



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA - 2018 -

<https://papua.bps.go.id>





**INDIKATOR
PASAR TENAGA KERJA
PROVINSI PAPUA
- 2018 -**

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 2018

No. Publikasi : 94520.1904
Katalog : 2302004.94
Ukuran Buku : A4 (21 cm x 29.7 cm)
Jumlah Halaman : x + 76 Halaman

Tim Penyusun:

Simon Sapary, Bagas Susilo, Paul Santoso, Rut Nirmala Nadapdap

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dicetak Oleh:

CV. Mitra Karya Pura

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Drs. Simon Sapary, M.SC.

Editor

Bagas Susilo, S.ST.,M.Si.

Pengolah Data

Paul Santoso, S.ST

Penulis

Rut M Nirmala Nadapdap, SST

Layout

Rut M Nirmala Nadapdap, SST

Desain Kover

Titis

<https://papua.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

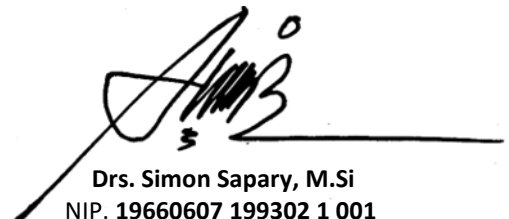
Pada tahun 2018, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilaksanakan secara semesteran dengan metodologi yang sama. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Semester I menghasilkan angka estimasi nasional sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga, juga terdapat 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2019, BPS Provinsi Papua menerbitkan publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Papua dengan kondisi Agustus 2018. Dalam publikasi ini menyajikan *Key Indicator of the Labour Market* (KILM) yang merupakan Indikator-indikator yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin, klasifikasi perkotaan dan perdesaan, serta hanya mencakup penduduk usia kerja. Beberapa indikator KILM menurut kabupaten/kota dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi penyesuaian terhadap publikasi edisi berikutnya.

Jayapura, Agustus 2019

**Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua,**



Drs. Simon Sapary, M.Si
NIP. 19660607 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim)	vii
1. Pendahuluan	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	2
1.2. Sakernas dan KILM	3
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	5
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	6
2. Penjelasan Teknis	9
2.1. Penjelasan Umum	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja	12
2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja	13
2.2.2. Indikator Pekerja	14
2.2.3. Indikator Pengangguran, <i>Underemployment</i> dan Ketidakaktifan	17
2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	20
2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	20
2.2.6. Produktifitas Tenaga Kerja	21
2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	21
2.2.8. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan	21
3. Indikator Pasar Tenaga Kerja	22
3.1. Partisipasi di Dunia Kerja (KILM 1)	22
3.2. Indikator Pekerja (KILM 2-KILM 7)	26
3.3. Indikator Pengangguran, <i>Underemployment</i> dan Ketidakaktifan (KILM 8 –KILM 13)	41
3.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Tahun 2016-2018	23
Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2016 - 2018	27
Tabel 3. Rasio Penduduk Bekerja (EPR) terhadap Total Penduduk Usia kerja, 2016-2018	28
Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2017-2018	30
Tabel 5. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2017 - 2018	33
Tabel 6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Penggunaan Waktu, 2017-2018	35
Tabel 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2018	37
Tabel 8. Jumlah dan Persentase Pekerja Menurut Sektor, 2017-2018	39
Tabel 9. Indikator Pengangguran Papua, 2017 - 2018	42
Tabel 10. Indikator Pengangguran Usia Muda di Papua, 2017- 2018	44
Tabel 11. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2017- 2018	46
Tabel 12. Indikator Setengah Penganggur, 2017- 2018	48
Tabel 13. Indikator Ketidakaktifan, 2017 - 2018	49
Tabel 14. Indikator Ketidakaktifan Menurut Pendidikan, 2017- 2018	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan	9
Gambar 2. Pola TPAK Menurut Kelompok Umur, 2017-2018	24
Gambar 3. TPAK Menurut Kabupaten/Kota Agustus 2018	25
Gambar 4. Pola EPR Menurut Kelompok Umur Agustus 2018	28
Gambar 5. Pola EPR Kabupaten/Kota, Agustus 2018	29
Gambar 6. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota, 2018	32
Gambar 7. Persentase Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten 2018	34
Gambar 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota Agustus 2018	36
Gambar 9. Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2018	38
Gambar 10. Persentase Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota Agustus 2018	40
Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Agustus 2018	43
Gambar 12. Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota, 2018	47
Gambar 13. Pola Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2018	51

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	54
Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 dan 2018	55
Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	56
Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2017 - 2018.....	57
Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	58
Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	59
Lampiran 7. Ratio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018.....	60
Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2018.....	61
Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2018.....	63
Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2018.....	64
Lampiran 11. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2018.....	65
Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal, 2018.....	68
Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin, 2018.....	69
Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018.....	70
Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018.....	71
Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018.....	72
Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018.....	73
Lampiran 18. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2018	74
Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018.....	75
Lampiran 20. Tabulasi Silang Batas Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama	76

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labor Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicator of The Labor Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUPAS	Survey Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan semakin dibutuhkan guna memberikan gambaran mengenai indikator pasar tenaga kerja. Data tersebut dihimpun melalui kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang rutin dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Sakernas tahun 2015-2019 kembali dilaksanakan secara semesteran. Angka estimasi Sakernas semester I mampu menggambarkan indikator pada level provinsi. Pada pelaksanaan semester II (bulan Agustus) dengan penambahan sampel komplemen, estimasi sakernas mampu memberikan deskripsi hingga level kabupaten/kota. BPS Provinsi Papua menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organization* - ILO) yaitu publikasi Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja / KILM (*Key Indicator of the Labor Market*). ILO telah meluncurkan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja / KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program regular pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Papua ini merujuk pada KILM yang diterbitkan BPS RI pada tahun 2011.

Adapun data dan indikator ketenagakerjaan yang disajikan dalam publikasi ini merujuk pada hasil Sakernas tahun 2017-2018. Indikator ketenagakerjaan pada level kabupaten/kota juga disajikan. Sebagaimana dijelaskan bahwa pelaksanaan Sakernas semester 2 (bulan Agustus) dengan penambahan sampel komplemen, mampu memberikan deskripsi hingga level kabupaten/kota. Dalam kondisi tertentu karena faktor lapangan dan responden, sehingga suatu kabupaten tidak dapat memenuhi target minimum sampel rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan data tidak tersedia karena sampel tidak mencukupi untuk estimasi level Kabupaten.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Untuk memperoleh data ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan sensus dan survey seperti: Sensus Penduduk (SP) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang menggambarkan keadaan ketenagakerjaan antar periode pencacahan adalah SAKERNAS.

Sakernas pertamakali dilaksanakan pada tahun 1976. Berbagai perubahan metodologi ataupun periode pencacahan telah terjadi. Tahun 1986 sampai 1993, Sakernas dilaksanakan secara triwulanan. Sejak tahun 1994 hingga 2001 dilaksanakan secara tahunan setiap bulan Agustus. Kemudian pada tahun 2002 sampai dengan 2004, selain dilaksanakan setiap tahun juga dilaksanakan secara triwulanan. Dan mulai tahun 2005 sampai tahun 2010 Sakernas berlangsung secara semesteran yaitu setiap bulan Februari dan Agustus.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan keakuratan data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas pada tahun 2011 dilakukan secara triwulanan yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November yang dirancang untuk estimasi level provinsi. Sedangkan untuk estimasi level kabupaten/kota, pada triwulan 3 (bulan Agustus) ditambah sampel komplemen. Selanjutnya, Mulai tahun 2015 Sakernas kembali dilaksanakan secara semesteran yaitu pada bulan Februari (Sakernas Semester I) untuk mendapatkan estimasi hingga tingkat provinsi. Pada bulan Agustus, selain sampel Sakernas Semester II terdapat sampel tambahan untuk memperoleh estimasi penyajian data hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Tujuan pengumpulan data Sakernas adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Dan secara khusus, ingin memperoleh informasi jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Sepanjang tahun 2011 Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumahtangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumahtangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus (BS) baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 BS tersebut terbagi menjadi 5.000 BS triwulan 3 dan 15.000 sisanya adalah blok sensus tambahan. Penambahan ini bertujuan untuk mampu mengestimasi data hingga level kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumahtangga korps diplomatik, rumahtangga yang tinggal di blok sensus khusus, rumahtangga khusus di blok sensus biasa tidak terpilih sebagai sampel. Di provinsi Papua sendiri, Sakernas dilaksanakan pada 204 blok sensus triwulanan untuk level provinsi dan pada pelaksanaan Agustus ditambah 612 blok sensus menjadi

816 blok sensus sampel untuk estimasi level kabupaten/kota. Total rumahtangga sampel untuk pelaksanaan Agustus sebesar 8160 rumahtangga.

Dari setiap rumahtangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumahtangga (ART) meliputi nama, hubungan dengan kepala rumahtangga, jenis kelamin dan umur. Khusus untuk ART yang berusia 10 tahun ke atas ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan pengalaman kerja.

1.2 SAKERNAS DAN KILM

Dari berbagai macam variabel yang dikumpulkan oleh Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi internasional (ILO) yaitu KILM. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP dan SUPAS) perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasikan dan menganalisa data ketenagakerjaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi:

1. Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian informasi yang dikumpulkan dalam SP dan Supas lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya seperti data pengeluaran/konsumsi, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan. Perbedaan tujuan ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survey relatif tidak sama.

2. Ukuran Sampel

Ukuran sampel Sakernas dan Supas atau Susenas tidak sama. Perbedaan ini mengakibatkan *sampling error* yang dikandung angka estimasi dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, semakin besar *sampling error*-nya.

3. Faktor Pengali

Faktor pengali yang digunakan dalam publikasi ini, berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2010 yang diproyeksi ke bulan Agustus 2015

4. Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan semester II (Agustus) 2006, Sakernas dikerjakan oleh pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai semester I (Februari) 2007 hingga semester II (Agustus) 2010 pencacahan dilakukan secara tim yang terdiri dari 2 pencacah dan 1 koordinator tim. Petugas

tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan/KSK) dan pegawai BPS kabupaten/kota. Pengalaman mereka sudah banyak sehingga menguasai medan/lapangan dan memahami dengan baik konsep dan definisi terkait kuesioner Sakernas. Sejak tahun 2011, Sakernas tidak dilakukan secara tim lagi dan kembali dicacah secara individu. Setiap pengawas meng-*handle* 2-3 orang pencacah.

5. Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, dan banyaknya pertanyaan maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/sederhana, mudah dimengerti serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6. Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, Sensus Penduduk, dan Supas berbeda. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya. Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan yang selanjutnya menjadi semesteran pada tahun 2015 dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, perlu untuk menyusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Di samping itu, penyusunan indikator kunci ketenagakerjaan /KILM pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan para tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari departemen Tenaga kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3 PERAN KILM DALAM KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan layak (*decent work*) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO adalah mempromosikan pekerjaan yang layak yang memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Penerapan konsep layak untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan suatu multitafsir. Persepsi setiap orang mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan.

Selain pekerjaan layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Ini diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), tetapi juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan melalui identifikasi kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu pekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih /*exceeds working hours* (KILM 6), pekerja sektor informal (KILM 7) dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan pencapaian Tujuan Pembangunan Milineum (MDG's).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh waktu (*full employment*), pekerja yang produktif dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*) untuk semua. Pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDG pertama memasukan target baru 1b (disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDG's tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap total

penduduk (*employment to population ratio / EPR*), proporsi pekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktifitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18 dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun hingga saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktifitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4 ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Saat ini semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan secara agregat. Salah satu keuntungan menggunakan data agregat adalah relatif lebih mudahnya melakukan perbandingan antar wilayah. Contohnya tingkat pengangguran, bisa dibandingkan antar daerah. Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah tidak hanya saja mengamati tingkat pengangguran, tetapi harus melihat unsur-unsur pasar tenaga kerja lainnya. Oleh karena itu, dalam menganalisis pasar tenaga kerja yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi. Pengelompokan penduduk usia kerja menjadi penduduk yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja dan bukan angkatan kerja, KILM 13); penduduk yang bekerja (KILM 2) atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang masuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja, atau keduanya, menunjukkan underutilisasi yang besar dari angkatan kerja yang potensial.

Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk aktif terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggungjawab rumahtangga, pemerintah mungkin ingin mendorong lingkungan yang memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan melalui misalnya, pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja fleksibel bagi perempuan atau program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan “putus asa” / *discourage worker*, yaitu karena merasa tidak ada lagi pekerjaan yang sesuai dan tersedia bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), usia (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10) dan tingkat pendidikan (KILM 11) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat. Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, seperti latar belakang sosial ekonomi, pengalaman kerja, dll, juga penting untuk dianalisa. Jika data tersebut tersedia dapat digunakan untuk menentukan kelompok mana yang mengalami kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam satu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah. Di negara-negara berkembang dengan skema ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka pekerja dapat lebih mampu meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal ini membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah “pekerjaan yang layak”. Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran nominatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa pekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan pada pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur menjadi sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan pekerjaan yang bergaji

(buruh/karyawan/pegawai) di kegiatan ekonomi formal, rombongan tenaga kerja akan berlomba-lomba mengisi kesempatan itu.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah penduduk bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6) atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

<https://papua.bps.go.id>

BAB 2

PENJELASAN TEKNIS

Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

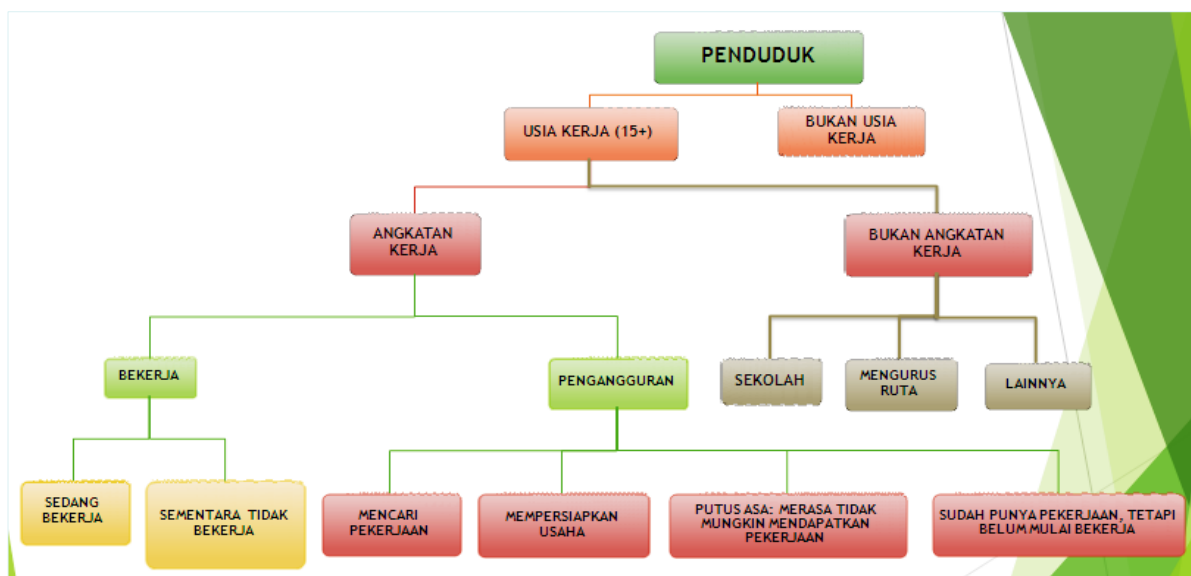
2.1 PENJELASAN UMUM

Sejauh ini sumber data makro mengenai situasi ketenagakerjaan yang secara luas dianggap paling kredibel adalah berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Suatu survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik secara rutin dalam mengintegrasikan data ketenagakerjaan yang mempunyai peran penting, karena dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode survei.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu pada *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *International Labour Organization* (ILO) seperti yang tercantum dalam buku **“Surveys or Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment” An ILO Manual Concepts and Methods**, ILO 1992. Tujuannya adalah agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concepts*) yang dapat dilihat pada bagan ketenagakerjaan di bawah ini.

GAMBAR 1. DIAGRAM KETENAGAKERJAAN



The *Labor Force Concept*, Yang Disarankan oleh *International Labour Organization* (ILO)

Perlu juga dipahami beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, usia kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi berniat menetap. Berdasarkan bagan ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Usia kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk mengelompokkan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia dalam memberikan batasan umur pada penduduk usia kerja, menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei Sakernas dikumpulkan informasi mulai dari penduduk usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Pemberian batas bawah dan batas atas bervariasi dari setiap negara sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Sebagai contoh penggunaan batas bawah: Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Canada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 Tahun), dan Venezuela (10 dan 15 tahun), sementara penggunaan batas atas penduduk usia kerja contohnya: Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 tahun), banyak negara termasuk Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja, dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan **bukan angkatan kerja** terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai /melakukan aktivitas ekonomi. Diantaranya dirinci menjadi tiga kelompok besar kegiatan, yaitu penduduk yang sedang sekolah, penduduk yang sedang mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sedang melakukan kegiatan lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial seperti berorganisasi dan kerja bakti).

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.

Kegiatan bekerja mencakup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi mereka yang sedang mencari kerja, atau mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Mencari kerja di sini adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha baru yang bertujuan memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah jika ada 'tindakan nyata' seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/ musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka yang tidak mencari kerja/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, namun pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Periode referensi lainnya yang digunakan dalam Sakernas adalah kriteria satu jam. Kriteria ini digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tidak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi penganggur yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*). BPS menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu" untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2 INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

ILO meluncurkan Indikator Pasar Tenaga Kerja / KILM (*Key Indicator of Labor Market*) pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

- 1) Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 2) Indikator pekerja, terdiri dari KILM 2 (rasio pekerja terhadap jumlah penduduk), KILM 3 (penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama), KILM 4 (lapangan usaha tenaga kerja), KILM 5 (pekerja paruh waktu), KILM 6 (jam kerja) dan KILM 7 (tenaga kerja di ekonomi formal);
- 3) Indikator pengangguran, *underemployment* dan ketidak-aktifan, yang terdiri dari KILM 8 (pengangguran), KILM 9 (pengangguran pada kelompok muda), KILM 10 (pengangguran jangka panjang), KILM 11 (pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan), KILM 12 (*underemployment*), dan KILM 13 (tingkat ketidakaktifan);
- 4) Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (pencapaian pendidikan dan melek huruf);

- 5) Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (indeks upah sektor manufaktur), KILM 16 (indikator upah dan pendapatan berdasarkan jabatan) dan KILM 17 (upah per jam);
- 6) Produktifitas tenaga kerja yang terdiri dari KILM 18 (produktifitas tenaga kerja);
- 7) Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (elastisitas tenaga kerja); dan
- 8) Indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan).

2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Table publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 25-34, 35-54, 55-64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai saat ini.

Beberapa konsep yang berkaitan dengan indikator ini adalah sebagai berikut:

Angkatan Kerja (AK)

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Dalam angkatan kerja terdapat penduduk yang kegiatannya adalah bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan

sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya.

Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

2.2.2. INDIKATOR PEKERJA

KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/ Employment to Population Ratio (EPR)

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

Berusaha sendiri.

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar.

Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Buruh/Karyawan/Pegawai.

Pekerja bebas di pertanian.

Pekerja bebas di nonpertanian.

Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;

Penduduk yang berusaha, terdiri dari:

Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan dibantu buruh tetap/buruh dibayar;

Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;

Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian;

Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/ lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan;

Pertambangan dan penggalian;

Industri pengolahan;

Listrik, gas dan air;

Bangunan;

Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel;

Angkutan, pergudangan dan komunikasi;

Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan;
Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu *A(agriculture)*/Pertanian, *M(anufacture)*/Manufaktur dan *S(ervices)*/Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System (Revisi 2 dan Revisi 3)*.

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, yang merupakan proporsi dari total pekerja. Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), garis pemisah tersebut ditentukan, baik atas dasar negara-oleh-negara atau melalui penggunaan estimasi khusus. Tetapi, jika tidak ada kesepakatan, biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 7. Tenaga Kerja Sektor Informal

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumahtangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/ informal yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dari jenis pekerjaan/jabatan.

2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, UNDER-EMPLOYMENT DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja. Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;

Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;

Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan

Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain,

termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok pekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/ faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang istilah “angkatan kerja” dan “bekerja” kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Pemuda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Pemuda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “pemuda” mencakup orang yang berusia 16 sampai 30 tahun, sedangkan “orang dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berusia 31 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada resiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan yang lebih rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi

pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM 12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi: Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan yang meliputi: Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang; Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak; Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai “buruk”, misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED-97). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut:

- Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/ Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan Paket B;
- Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, Paket C; dan
- Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana dan S2/S3.

2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan pekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survey Upah dan Survey Struktur Upah) yang bukan merupakan bagian dari Sakernas yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu indikator tersebut tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan

Berdasarkan Jabatan Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Estimasi pendapatan dapat saja dilakukan dengan menggunakan teknik statistik (*Two Step Heckmen*). Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah Per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, pekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar pekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas, yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat beresiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

KILM 18. Produktifitas Tenaga Kerja

Tingkat produktifitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (Labor/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktifitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktifitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor yang memerlukan tenaga kerja yang banyak (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Tetapi, keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan tidak bisanya indikator ini disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PEKERJA MISKIN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas

BAB 3

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

3.1 PARTISIPASI DI DUNIA KERJA (KILM 1)

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Berikut disajikan tingkat partisipasi angkatan kerja sakernas agustus 2018 dan 2015.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK dihitung dengan menyatakan jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ditentukan untuk pengukuran karakteristik ekonomi.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada Agustus 2018 yang masuk dalam angkatan kerja ada sebanyak 1.835.963 jiwa, meningkat jika dibandingkan Agustus 2017. Pada periode yang sama, TPAK meningkat dari 76,94 persen pada Agustus 2017 menjadi 79,11 persen pada Agustus 2018. Peningkatan jumlah angkatan kerja disertai kenaikan pada TPAK salah satunya disebabkan oleh jumlah penduduk usia kerja (15 plus) yang penambahannya hampir sebanding dengan penambahan angkatan kerja itu sendiri.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi daerah, TPAK laki-laki menurun dari 87,28 persen pada Agustus 2017 menjadi 86,39 persen pada Agustus 2018. Sebaliknya TPAK perempuan meningkat dari 70,33 persen pada Agustus 2016 menjadi 70,80 persen pada Agustus 2018. TPAK perkotaan juga meningkat dari 62,23 persen pada Agustus 2017 menjadi 65,34 persen pada Agustus 2018 demikian juga dengan TPAK perdesaan yang naik dari 82,89 di Agustus 2017 menjadi 84,85 pada Agustus 2018.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Tahun 2016 - 2018

Kategori	2016	2017	2018
TOTAL	76,70	76,94	79,11
LAKI-LAKI	85,85	85,28	86,39
PEREMPUAN	66,25	67,45	70,80
PERKOTAAN	63,95	62,23	65,34
PERDESAAN	81,76	82,89	84,85
(15-64)	77,51	77,79	79,95
LAKI-LAKI	86,75	86,27	87,28
PEREMPUAN	67,01	68,17	71,63
PERKOTAAN	65,49	63,59	66,74
PERDESAAN	82,22	83,44	85,36
(15-24)	55,95	54,53	55,29
LAKI-LAKI	61,04	58,59	59,85
PEREMPUAN	50,18	49,74	49,90
PERKOTAAN	38,54	34,60	37,72
PERDESAAN	62,70	63,02	63,22
(25-54)	87,24	86,63	89,03
LAKI-LAKI	98,11	96,86	97,69
PEREMPUAN	75,10	75,39	79,54
PERKOTAAN	78,19	75,96	78,63
PERDESAAN	90,66	90,62	93,00
(25-34)	87,15	85,77	88,33
LAKI-LAKI	96,95	96,11	97,03
PEREMPUAN	76,71	75,39	78,99
PERKOTAAN	78,11	73,98	77,91
PERDESAAN	90,73	90,22	92,56
(35-54)	87,29	87,21	89,48
LAKI-LAKI	98,86	97,34	98,12
PEREMPUAN	73,97	75,39	79,90
PERKOTAAN	78,25	77,32	79,13
PERDESAAN	90,62	90,89	93,28
(55-64)	73,54	70,76	76,38
LAKI-LAKI	85,45	81,11	84,08
PEREMPUAN	56,64	56,47	65,50
PERKOTAAN	58,80	54,13	63,94
PERDESAAN	81,77	80,12	83,24
65 Tahun ke atas	40,90	38,75	42,18
LAKI-LAKI	48,99	44,06	50,57
PEREMPUAN	30,27	31,56	30,77
PERKOTAAN	18,93	22,42	26,99
PERDESAAN	56,87	51,50	55,29

Sumber: Sakernas 2016-2018

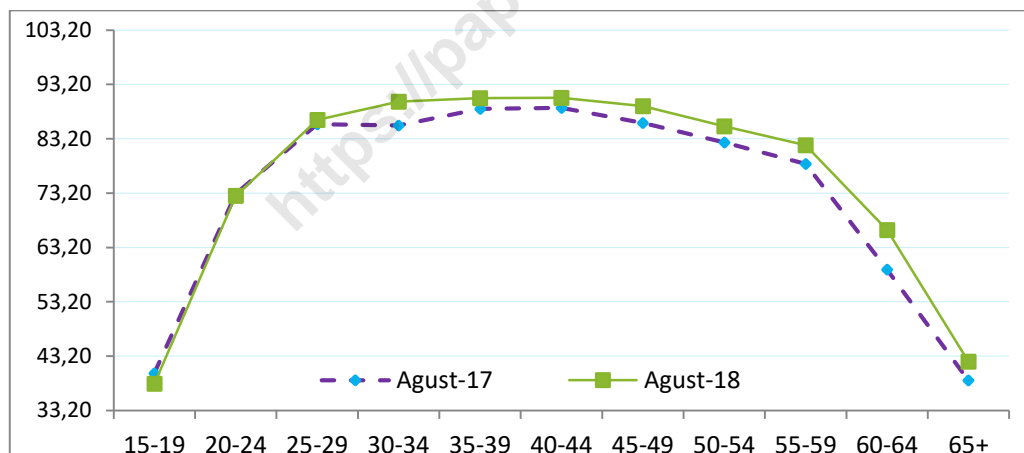
Ketika penduduk dipisahkan menurut kelompok umur seperti tabel 1, tampak bahwa secara umum pada kelompok umur usia produktif (15-64 tahun), TPAK meningkat dari 77,79 persen menjadi 79,95 persen. Berbanding lurus dengan TPAK kelompok umur tertentu, terlihat kenaikan

TPAK pada semua kelompok umur yaitu kelompok umur 25-54, 25-34, 35-54, 55-64, dan 65 tahun ke atas.

Pada grafik TPAK menurut kelompok umur di bawah ini, yang menggambarkan pola TPAK menurut kelompok umurnya, dapat dilihat bahwa pola yang serupa terjadi di Agustus 2017 maupun Agustus 2018. Secara umum pada periode yang sama partisipasi angkatan kerja mencapai puncaknya pada kelompok umur 40-44 tahun. Pada kelompok umur tersebut partisipasi dan produktivitas kerja sangat tinggi. Selanjutnya tingkat partisipasi kembali berkurang pada kelompok umur 60 tahun ke atas.

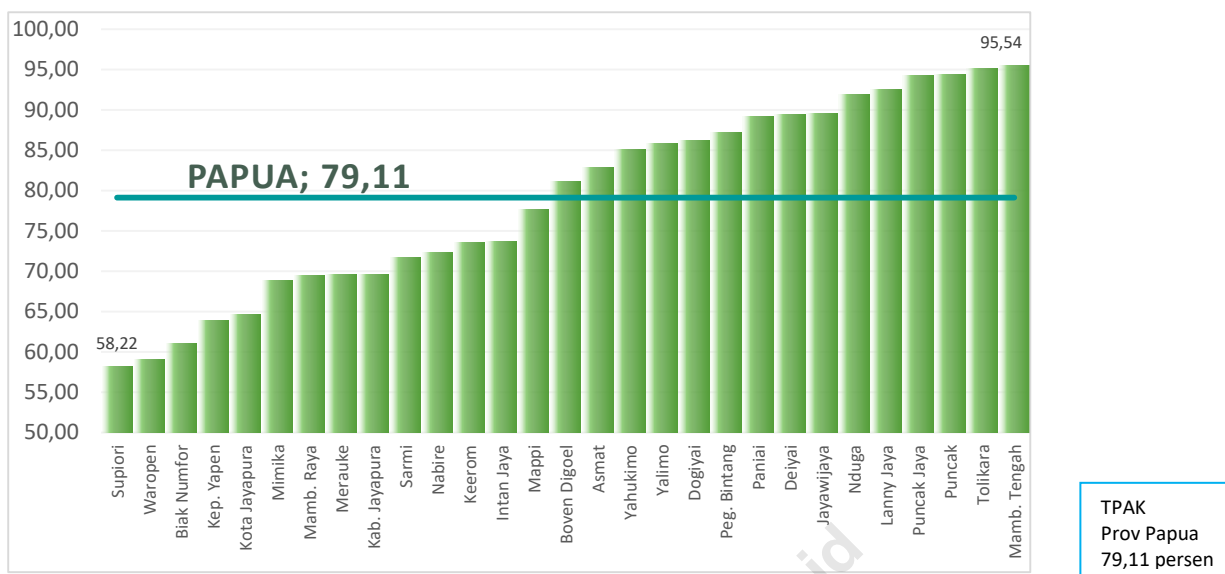
Dengan mengamati grafik kelompok umur tersebut, terlihat bahwa pola TPAK tahun 2017 dan 2018 cukup serupa yaitu meningkat di kelompok umur awal (15-19 tahun) lalu keduanya mencapai puncaknya pada usia 40-44 tahun. Namun, bila diperhatikan lebih lanjut pada TPAK 2017 terjadi penurunan pada kelompok umur 30-34 tahun sehingga menimbulkan gap yang lebar terhadap TPAK 2018. Kemudian pada kelompok umur 45-49 tahun hingga 50-54 tahun selisih variasi yang tidak begitu signifikan namun saling beriringan mengalami penurunan. Penurunan TPAK pada Agustus 2017 terhadap Agustus 2018 dengan relatif cepat terjadi pada kelompok umur 55-59 tahun dan 65 tahun ke atas.

Gambar 2. Pola TPAK Menurut Kelompok Umur, 2017-2018



Sumber: Sakernas 2017-2018, data diolah

Gambar 3. TPAK Menurut Kabupaten/Kota, 2018



Dari Gambar 3 di atas dapat dilihat pergerakan TPAK yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Papua pada Agustus 2018 (garis vertikal), sebuah garis horizontal adalah TPAK provinsi Papua. Untuk lebih memudahkan pengamatan, tingkat partisipasi diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tampak bahwa setelah diurutkan maka TPAK tertinggi terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah dan terendah yaitu Kabupaten Supiori. Disparitas yang terjadi antara TPAK tertinggi terhadap terendah sekitar 37,32 persen. Selanjutnya dengan mengacu pada TPAK Provinsi Papua sebagai rata-rata maka terdapat 14 kabupaten yang TPAK-nya masih berada dibawah rata-rata Provinsi Papua. Sebaliknya terdapat lebih dari separuh (15 kabupaten/kota) yang partisipasi angkatan kerjanya di atas rata-rata provinsi

3.2. INDIKATOR PEKERJA

KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/ Employment to Population Ratio (EPR)

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu wilayah.

Pada periode Agustus 2017 ke Agustus 2018, nilai EPR Provinsi Papua meningkat dari 74,16 menjadi 76,58 pada tahun 2018 atau meningkat 2,42 persen. Hal ini menjelaskan bahwa telah terjadi kenaikan persentase penduduk yang bekerja pada periode Agustus 2017 hingga Agustus 2018 secara signifikan. EPR Papua sebesar 76,58 persen pada tahun 2018 mempunyai arti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 76 orang yang bekerja pada Agustus 2018. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, pada Penduduk Usia Kerja (Penduduk 15 Tahun Ke atas) terjadi peningkatan EPR pada laki-laki dan begitu juga kenaikan EPR pada perempuan (perbandingan tahun 2017 dan 2018). Sedangkan jika dipisahkan menurut tempat tinggal, terjadi peningkatan EPR baik di perkotaan dan maupun di perdesaan.

Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2016-2018

Kelompok Umur	2016	2017	2018
Usia 15 tahun ke atas	2.245.462	2.291.111	2.320.862
Laki-laki	1.196.654	1.166.792	1.236.571
Perempuan	1.048.808	1.022.438	1.084.291
Perkotaan	638.684	614.640	683.284
Perdesaan	1.606.778	1.574.590	1.637.578
Umur muda (15-24)	623.458	543.178	549.132
Laki-laki	331.110	293.802	297.593
Perempuan	292.348	249.376	251.539
Perkotaan	174.315	162.254	170.758
Perdesaan	449.143	380.924	378.374
Umur dewasa (25+)	1.622.004	1.747.933	1.771.730
Laki-laki	865.544	925.876	938.978
Perempuan	756.460	822.057	832.752
Perkotaan	464.369	497.185	512.526
Perdesaan	1.157.635	1.250.748	1.259.204
Umur 15 tahun ke atas yang bekerja	1.664.485	1.680.093	1.777.207
Laki-laki	989.932	986.892	1.031.299
Perempuan	674.553	693.201	745.908
Perkotaan	379.468	368.434	409.002
Perdesaan	1.285.017	1.311.659	1.368.205
Umur muda(15-24) yang bekerja	317.890	260.373	272.279
Laki-laki	183.234	148.324	157.573
Perempuan	134.656	112.049	114.706
Perkotaan	53.365	36.371	46.142
Perdesaan	264.525	224.002	226.137
Umur dewasa (25+) yang bekerja	1.346.595	1.419.720	1.504.928
Laki-laki	806.698	838.568	873.726
Perempuan	539.897	581.152	631.202
PerkotaanP	326.103	332.063	362.860
Perdesaan	1.020.492	1.087.657	1.142.068

Sumber: Sakernas 2016-2018, data diolah

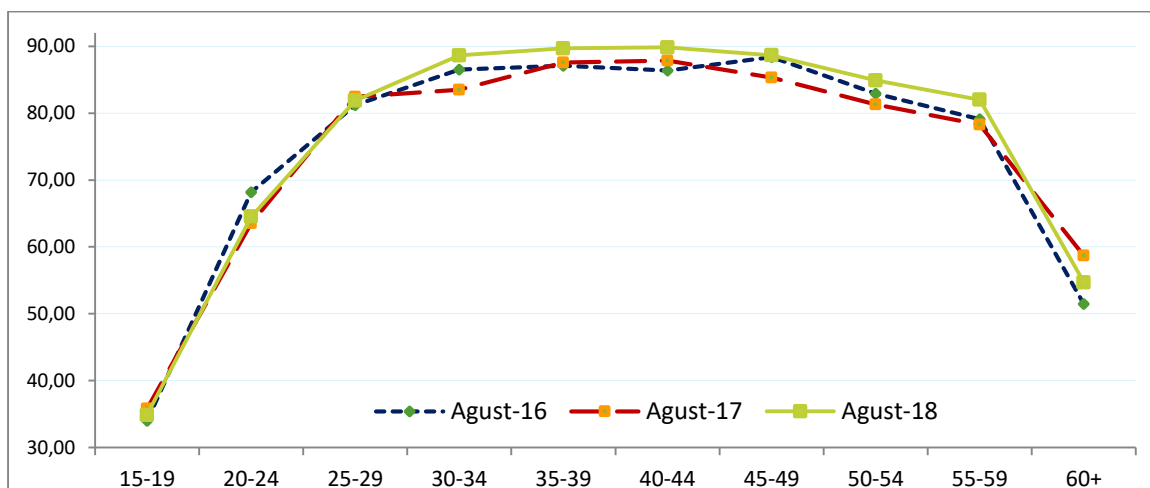
Tabel 3. Rasio Penduduk Bekerja (EPR) terhadap Total Penduduk Usia Kerja, 2016-2018

Kelompok Umur	2016	2017	2018
EPR Penduduk 15 +	74.13	74.16	76,58
Laki-laki	82.72	81.93	83,40
Perempuan	64.32	65.31	68,79
Perkotaan	59.41	56.61	59,86
Perdesaan	79.97	81.25	83,55
EPR Penduduk Usia 15-24	50.99	47.94	49,58
Laki-laki	55.34	50.48	52,95
Perempuan	46.06	44.93	45,60
Perkotaan	30.61	22.42	27,02
Perdesaan	58.90	58.80	59,77
EPR Penduduk Usia 25 Tahun +	83.02	82.31	84,94
Laki-laki	93.20	91.91	93,05
Perempuan	71.37	71.49	75,80
Perkotaan	70.22	67.77	70,80
Perdesaan	88.15	88.09	90,70

Sumber: Sakernas 2016-2018, data diolah

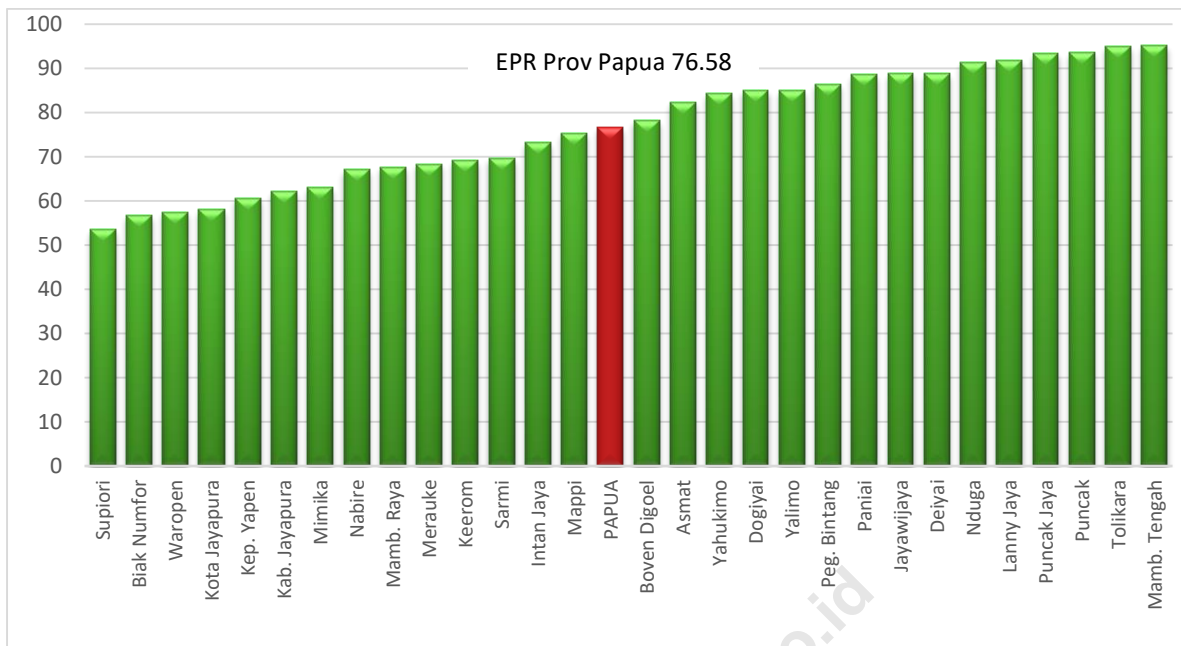
Adapun jika nilai EPR ini diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur sebagaimana ditunjukkan di tabel 3, dapat dilihat bahwa pada Agustus 2018 EPR Penduduk Dewasa (25 tahun ke atas) sebesar 84,94 persen jauh lebih besar dibandingkan EPR Penduduk Usia Muda (15-24 tahun) yang hanya sebesar 49,58 persen. Selisih yang cukup jauh antara EPR 25 tahun ke atas dan EPR 15-24 tahun menunjukkan sebagian besar penduduk usia muda tidak terlibat dalam pasar kerja melainkan masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja karena aktifitas seperti menempuh ilmu atau sekolah.

Gambar 4. Pola EPR menurut Kelompok Umur, 2016-2018



Sumber: Sakernas 2016-2018, data diolah

Gambar 5. Pola EPR Kabupaten/Kota, Agustus 2018



Sumber: Sakernas 2018, data diolah

Jika diamati menurut kabupaten/kota, terlihat pada Gambar 5 bahwa pada Agustus 2018 terdapat 2 kabupaten dengan EPR di atas 95 persen yaitu EPR tertinggi di Kabupaten Mamberamo Tengah (95,24 persen), dan Tolikara (95,00 persen). Di sisi lain tampak bahwa terdapat Empat Belas kabupaten dengan EPR di bawah EPR Provinsi Papua. Empat kabupaten/kota dengan EPR terendah yakni Supiori, Biak Numfor, Waropen, Kota Jayapura. Rendahnya rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja adalah karena persentase penduduk pengangguran dan penduduk bukan angkatan kerja yang cukup tinggi.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi penduduk bekerja menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/ karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2017-2018

INDIKATOR	2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%
TOTAL	1.699.071	100,00	1.777.207	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	354.363	20,86	375.896	21,15
Berusaha	798.636	47,00	823.155	46,32
Pengusaha	16.135	0,95	21.646	1,22
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	758.412	44,64	785.838	44,22
Pekerja bebas	24.089	1,42	15.671	0,88
Pekerja keluarga	551.218	32,44	578.156	32,53
Pekerja rentan	1.333.719	78,50	1.379.665	77,63
Laki-laki	999.310	100,00	1.031.299	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	263.290	26,35	275.134	26,68
Berusaha	620.886	62,13	635.155	61,59
Pengusaha	14.404	1,44	18.716	1,81
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	589.415	58,98	603.298	58,50
Pekerja bebas	17.067	1,71	13.141	1,27
Pekerja keluarga	115.134	11,52	121.010	11,73
Pekerja rentan	721.616	72,21	737.449	71,51
Perempuan	699.761	100,00	745.908	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	91.073	13,01	100.762	13,51
Berusaha	172.604	24,67	188.000	25,20
Pengusaha	1.731	0,25	2.930	0,39
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	168.997	24,39	182.540	24,47
Pekerja bebas	1.876	0,27	2.530	0,34
Pekerja keluarga	436.084	62,93	457.146	61,29
Pekerja rentan	606.957	87,59	642.216	86,10

Sumber: Sakernas 2017-2018, data diolah

Kategori status pekerjaan utama pada publikasi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

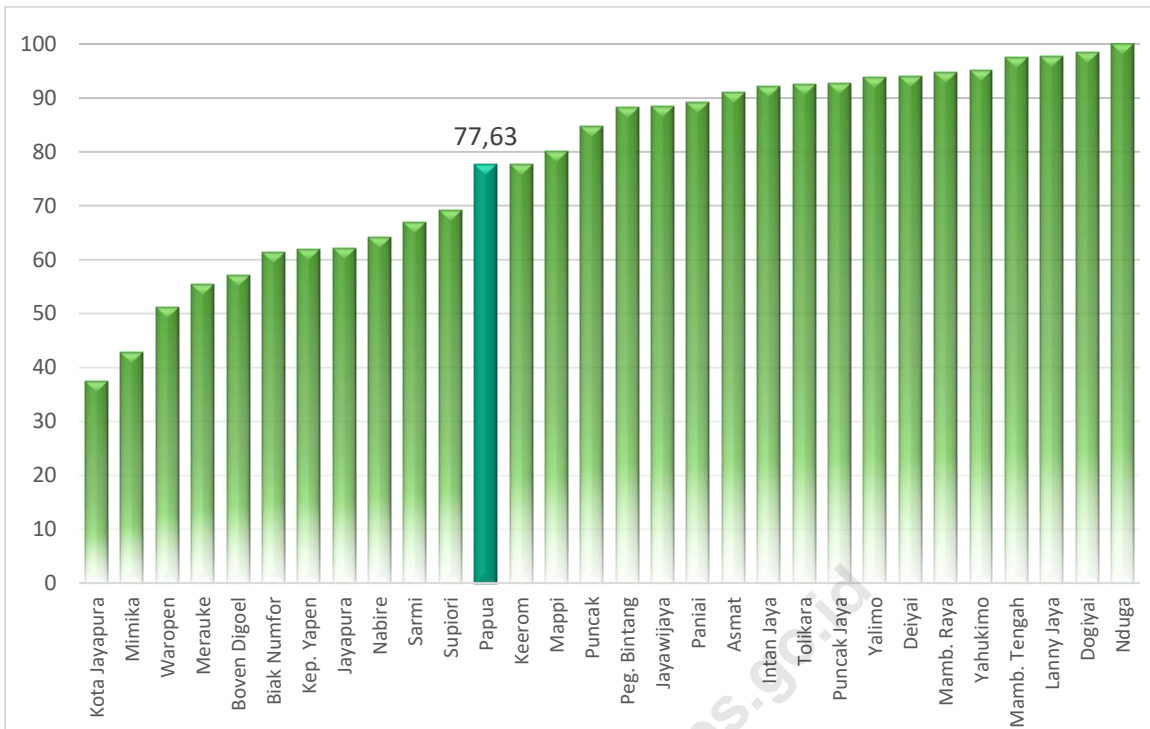
- 1) Pekerja dengan upah dan gaji
- 2) Pekerja yang berusaha /wiraswasta
- 3) Pekerja keluarga masing-masing yang dinyatakan sebagai proporsi dari total bekerja

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama pada tabel di atas menunjukkan pada periode Agustus 2017 dan Agustus 2018 terjadi kenaikan persentase pada pekerja dengan status yaitu: Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai), Pengusaha, pekerja keluarga. Sebaliknya terjadi penurunan pada status berusaha, termasuk yaitu pada Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja rentan.

Dilihat dari sisi gender, dianggap masih terjadi ketimpangan secara ekonomi, tercatat bahwa dominasi pekerja perempuan ada pada status pekerja keluarga masih tinggi, tampak bahwa persentasenya lebih dari empat kali lipat pekerja laki-laki pada status yang sama yaitu pekerja keluarga. Tidak bisa dipungkiri jika pekerja rentan lebih didominasi oleh pekerja perempuan. Pada semua status pekerjaan utama, pekerja perempuan memiliki persentase yang lebih rendah dari pekerja laki-laki kecuali status sebagai pekerja keluarga yang membantu keluarganya untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, pekerja keluarga yang dimaksud ialah mereka yang membantu keluarga atau suami dalam mencari nafkah tanpa diberi upah, contohnya istri membantu suaminya berkebun, beternak, jualan di kios, dll,

Persentase pekerja rentan menurut kabupaten/kota dapat diamati pada gambar di bawah ini. Dengan mengurutkan persentase pekerja rentan dari terendah hingga yang tertinggi dapat lebih mudah untuk dianalisa. Dari grafik yang tersaji terlihat bahwa persentase pekerja rentan di sebagian besar kabupaten masih sangat tinggi. Persentase pekerja rentan yang di bawah 50 persen paling banyak terdapat di Kota Jayapura (37,50 persen) kemudian disusul Kabupaten Mimika (42,87 persen). Sedangkan kabupaten lainnya didominasi pekerja rentan yaitu di atas 50 persen. Tingginya pekerja rentan di hampir semua kabupaten mengindikasikan masih rendahnya produktivitas, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini ditengarai karena sebagian besar pekerja berpendidikan SD ke bawah, terserap di sektor pertanian dan dengan status bekerja sendiri, dibantu buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga.

Gambar 6. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: Sakernas 2018, data diolah

KILM 4, Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor

Informasi sektoral dapat digunakan untuk mengidentifikasi distribusi dan pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja cenderung berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa. Dalam konteks ruang/spasial pekerja berpindah dari desa ke kota, Proses tersebut dapat dikatakan sebagai peralihan aktivitas ekonomi dari yang bersifat tradisional ke aktivitas ekonomi modern.

Untuk kepentingan analisis, aktivitas sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu *A(griculture)*/Pertanian, *M(anufacture)*/Manufaktur dan *S(ervices)*/Jasa-Jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

Tabel 5. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2017-2018

INDIKATOR	2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	1,163,328	68,47	1.204.116	67,75
Manufaktur	97,685	5,75	95.842	5,39
Pertambangan	16,773	0,99	16.226	0,91
Industri	37,917	2,23	31.077	1,75
Listrik, air, dan gas	1,632	0,10	3.214	0,18
Bangunan	41,363	2,43	45.325	2,55
JASA-JASA	438,058	25,78	477.249	26,85
Perdagangan	136,261	8,02	147.575	8,30
Transportasi	53,297	3,14	63.585	3,58
Keuangan	17,267	1,02	15.113	0,85
Jasa kemasyarakatan	231.333	13,61	250.976	14,12
TOTAL	1.699.071	100,00	1.777.207	100,00
Pertanian	83,130	8,32	644.427	62,49
Manufaktur	16,115	1,61	82.760	8,02
Pertambangan	24,888	2,49	14.761	1,43
Industri	1,519	0,15	21.479	2,08
Listrik, air, dan gas	40,608	4,06	2.914	0,28
Bangunan	286,647	28,68	43.606	4,23
JASA-JASA	63,500	6,35	304.112	29,49
Perdagangan	50,756	5,08	62.739	6,08
Transportasi	13,568	1,36	60.679	5,88
Keuangan	158,823	15,89	11.699	1,13
Jasa kemasyarakatan	629,533	63,00	168.995	16,39
LAKI-LAKI	629,533	63,00	1.031.299	100,00
Pertanian	14,555	2,08	559.689	75,03
Manufaktur	658	0,09	13.082	1,75
Pertambangan	13,029	1,86	1.465	0,20
Industri	113	0,02	9.598	1,29
Listrik, air, dan gas	755	0,11	300	0,04
Bangunan	151,411	21,64	1.719	0,23
JASA-JASA	72,761	10,40	173.137	23,21
Perdagangan	2,541	0,36	84.836	11,37
Transportasi	3,699	0,53	2.906	0,39
Keuangan	72,410	10,35	3.414	0,46
Jasa kemasyarakatan	533,795	76,28	81.981	10,99
PEREMPUAN	533,795	76,28	745.908	100,00

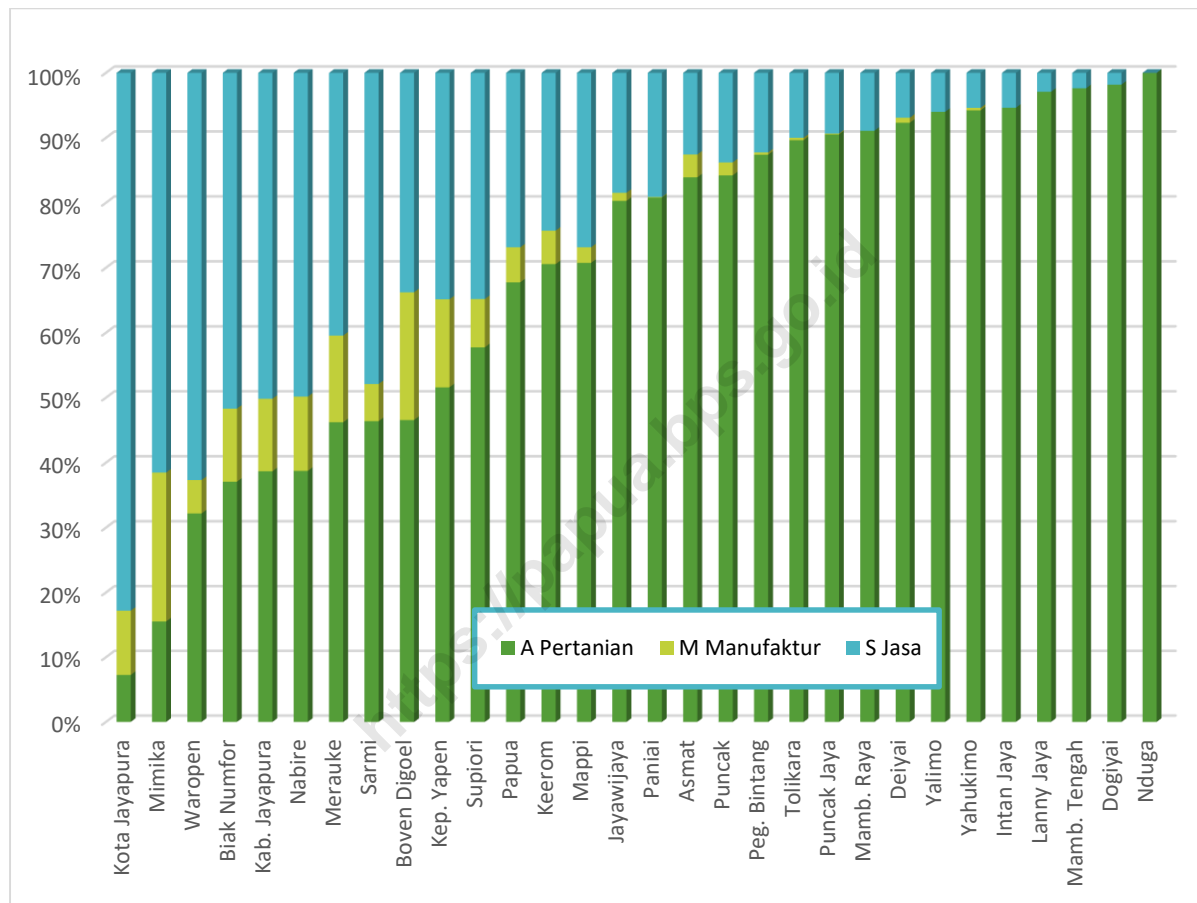
Sumber: Sakernas 2017-2018, data diolah

Hasil Sakernas Agustus 2018 menunjukkan bahwa distribusi ketenagakerjaan di Provinsi Papua, masih didominasi sektor pertanian. Terbukti secara sektoral proporsi jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini mencapai 67,75 persen disusul sektor jasa sebesar 26,85 persen. Persentase penduduk bekerja sektor pertanian ini menurun jika dibandingkan Agustus 2017 yang berada pada kisaran 68,47 persen. Sektor-sektor lain yang persentasenya menurun dari tahun 2017 ke tahun

2018 adalah sektor manufaktur, pertambangan, industri, dan keuangan. Sedangkan sektor listrik, air, dan gas, bangunan, jasa-jasa, perdagangan, transportasi, dan jasa kemasyarakatan mengalami kenaikan pada periode yang sama.

Jika melihat sebarannya di kabupaten/kota pada gambar di bawah ini, hal serupa dapat terlihat bahwa hampir di semua kabupaten/kota didominasi oleh pekerja di Sektor Pertanian dan Sektor Jasa. Pola ini pada dasarnya terjadi baik Agustus 2018 maupun pada Agustus tahun 2017.

Gambar 7. Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Sakernas 2018, data diolah

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, yang merupakan proporsi dari total pekerja. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Tabel 6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Penggunaan Waktu, 2017-2018

INDIKATOR	2017	2018
Jumlah Penduduk yang Bekerja	1.699.071	1.777.207
Laki-laki	999.310	1.031.299
Perempuan	699.761	745.908
Perkotaan	373.319	409.002
Perdesaan	1.325.752	1.368.205
Jumlah Pekerja Paruh Waktu	699.922	740.469
Laki-laki	357.835	374.710
Perempuan	342.087	365.759
Perkotaan	67.208	72.638
Perdesaan	632.714	667.831
Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	41,19	41,66
Laki-laki	35,81	36,33
Perempuan	48,89	49,04
Perkotaan	18,00	17,76
Perdesaan	47,72	48,81
Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	48,88	49,40

Sumber: Sakernas 2018, data diolah

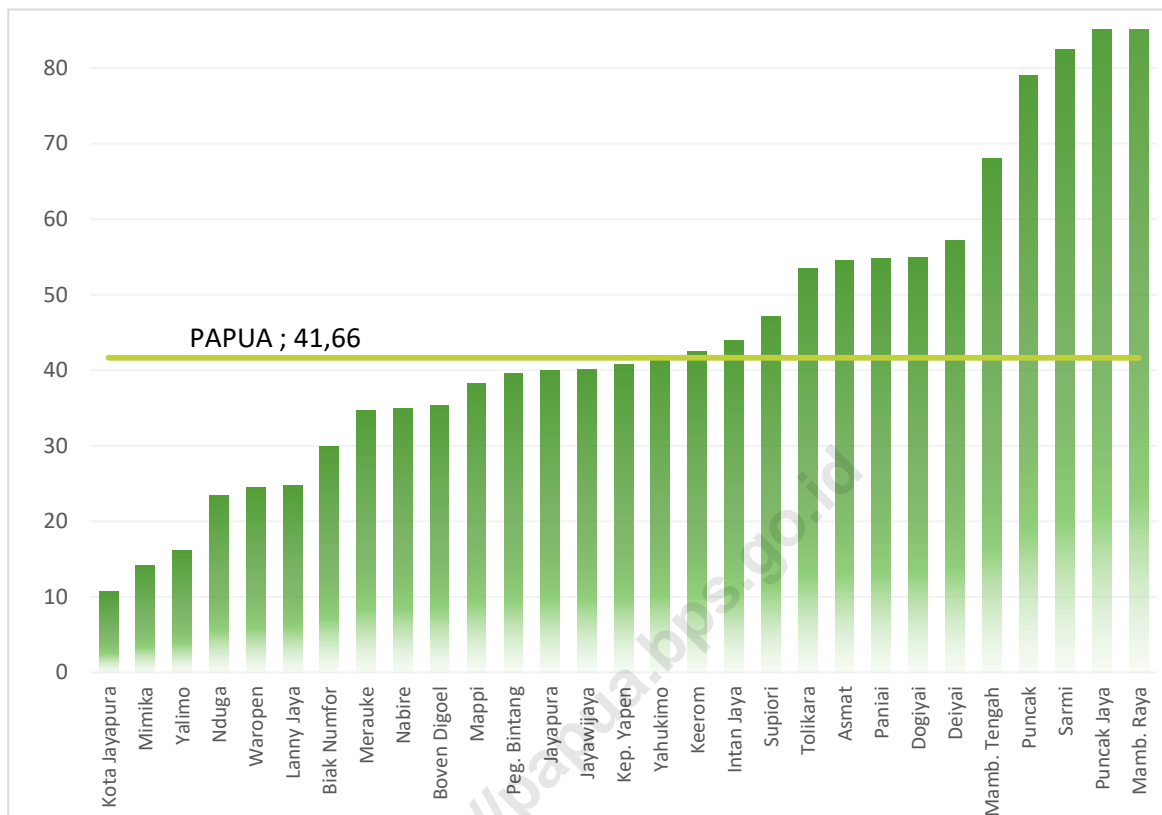
Pada Agustus 2018, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 41,66 persen jika dibandingkan kondisi Agustus 2017 hanya 41,19 persen. Arti dari angka 41,66 persen ini yaitu pada Agustus 2018 dari 100 orang yang bekerja, sekitar 42 orang diantaranya merupakan pekerja paruh waktu atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Sementara *share* perempuan pada seluruh pekerja paruh waktu meningkat dari 48,88 persen pada Agustus 2017 menjadi 49,40 persen pada Agustus 2018. Artinya adalah pada Agustus 2018, dari 100 orang pekerja paruh waktu, sekitar 49 diantaranya adalah perempuan.

Berdasarkan klasifikasi tempat tinggalnya, terlihat bahwa pada Agustus 2018 tingkat pekerja paruh waktu di perdesaan mencapai hampir tiga kali lipat di perkotaan. Besarannya masing-masing yaitu 17,76 persen di perkotaan dan 48,81 persen di perdesaan.

Jika dilihat sebarannya menurut kabupaten/kota, pada tahun 2018 tingkat pekerja paruh waktu tertinggi berada di Kabupaten Mamberamo Raya yaitu sebesar 96,95 persen dan terendah berada di Kota Jayapura yaitu sebesar 10,70 persen. Dengan semakin rendahnya persentase pekerja

paruh waktu di suatu kabupaten/kota, maka dapat diketahui bahwa produktivitas dan kesejahteraan penduduk yang bekerja semakin lebih baik.

Gambar 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu menurut Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Sakernas 2018, data diolah

KILM 6. Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang bekerja menurut jam kerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja perminggu, antara 25 dan 34 jam, antara 35 dan 39 jam, antara 40-48 jam, antara 49-59 jam, 60 jam ke atas.

Hasil Sakernas Agustus 2018 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja bekerja di atas jam kerja normal (35 jam kerja perminggu) yaitu mencapai 59,68 persen. Dan yang bekerja di bawah jam kerja normal sekitar 44,92 persen. Keadaan ini meningkat dibandingkan Agustus 2017 yang mencapai 57,36 persen pada pekerja bekerja di atas 35 jam per minggu.

Tabel 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Tahun 2018

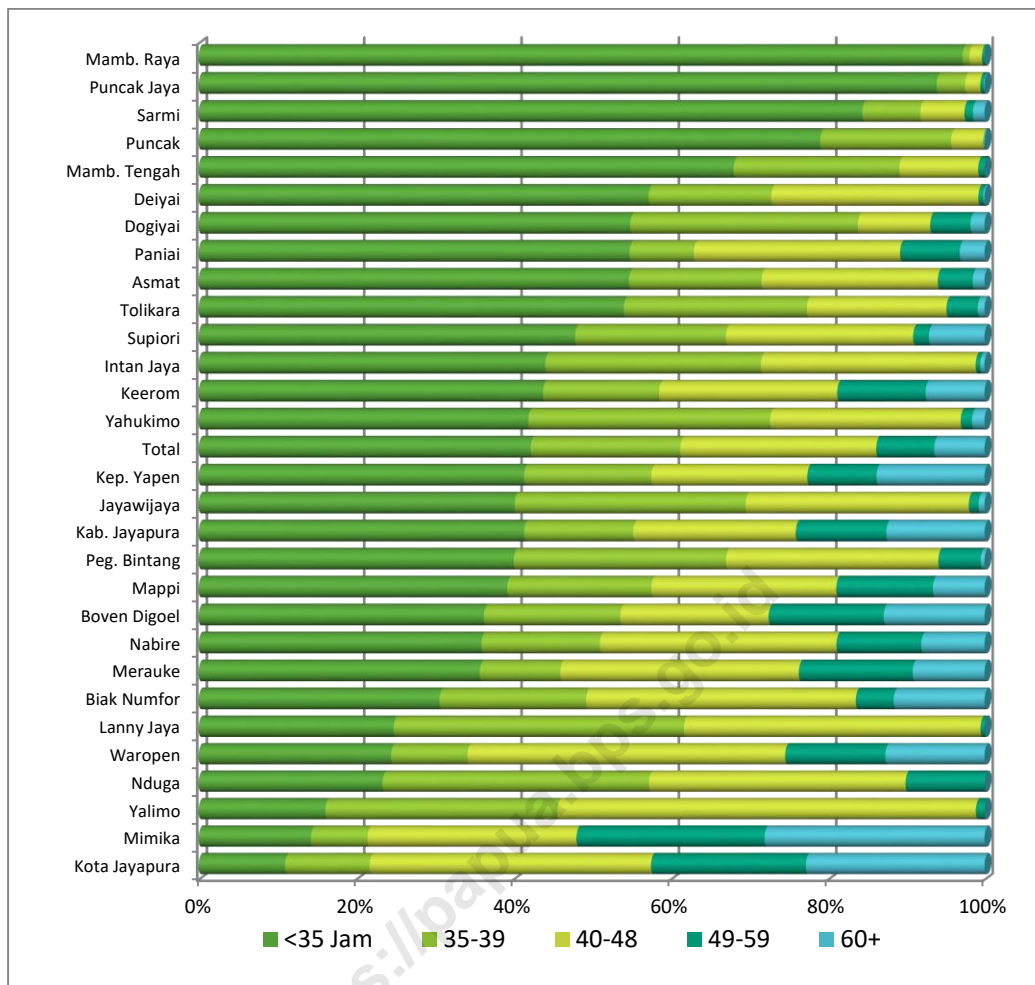
Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
a. 0 jam	15.703	7.046	22.749
b. 1-14 jam	57.708	57.620	115.328
c. 15-24 jam	120.434	147.857	268.291
d. 25-34 jam	196.568	160.282	356.850
e. 35-39 jam	184.007	149.718	333.725
f. 40-48 jam	277.238	159.973	437.211
g. 49-59 jam	95.639	34.707	130.346
h. 60 jam ke atas	84.002	28.705	112.707

Indikator	Perkotaan	Perdesaan	Total
a. 0 jam	9.326	13.423	22.749
b. 1-14 jam	12.560	102.768	115.328
c. 15-24 jam	24.039	244.252	268.291
d. 25-34 jam	36.039	320.811	356.850
e. 35-39 jam	44.555	289.170	333.725
f. 40-48 jam	136.038	301.173	437.211
g. 49-59 jam	67.028	63.318	130.346
h. 60 jam ke atas	79.417	33.290	112.707

Sumber: Sakernas 2018, data diolah

Dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase pekerja laki-laki yang bekerja di atas 35 jam perminggu jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Sementara itu distribusi penduduk bekerja menurut klasifikasi tempat tinggalnya di mana pada daerah perkotaan, kelompok yang bekerja 0 hingga 48 jam ke atas lebih banyak dibanding pekerja di perkotaan. Khusus untuk penduduk bekerja 60 jam ke atas yang mencapai 79.417 orang menunjukkan bahwa produktivitas penduduk di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan yang hanya mencapai 33.290 orang.

Gambar 9. Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Sakernas 2018, data diolah

Selanjutnya mengamati distribusi penduduk bekerja pada level kabupaten/kota. Dapat diketahui bahwa penduduk bekerja di bawah jam normal atau kurang dari 35 jam seminggu di atas 70 persen pada periode referensi (seminggu yang lalu) antara lain: Kabupaten Mamberamo Raya, Puncak Jaya, Sarmi, Puncak, Mamberamo Tengah. Sedangkan sebaliknya tiga kabupaten dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Yalimo.

KILM 7. Tenaga Kerja Sektor Informal

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja, Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumahtangga yang dimiliki oleh rumah tangga, Mereka

yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder, Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal, BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/informal yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dari jenis pekerjaan/jabatan,

Pada tabel 8 berikut dapat dilihat sebaran pekerja di sektor formal dan informal yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin maupun wilayah tempat tinggal. Terlihat bahwa pada Agustus 2018, proporsi pekerja yang bekerja di sektor informal mencapai 77,63 persen dan yang bekerja di sektor formal hanya sekitar 22,37 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2017, sektor formal mengalami peningkatan yaitu dari 0,56 persen. Sebaliknya sektor informal menurun dari 78,19 persen pada Agustus 2017 menjadi 77,63 persen pada Agustus 2018. Perubahan distribusi penduduk bekerja menurut sektor tersebut dapat mengidentifikasi kenyataan bahwa telah terjadi peralihan pekerjaan (*shifting*) penduduk bekerja.

Pada periode yang sama, jumlah dan persentase laki-laki maupun perempuan yang bekerja di sektor informal nyaris tidak mengalami perubahan (antara periode tahun 2017 dan 2018). Selanjutnya jika mengamati penduduk yang bekerja menurut tempat tinggal, maka pekerja sektor informal di daerah perdesaan meningkat, sebaliknya pekerja informal di perkotaan menurun.

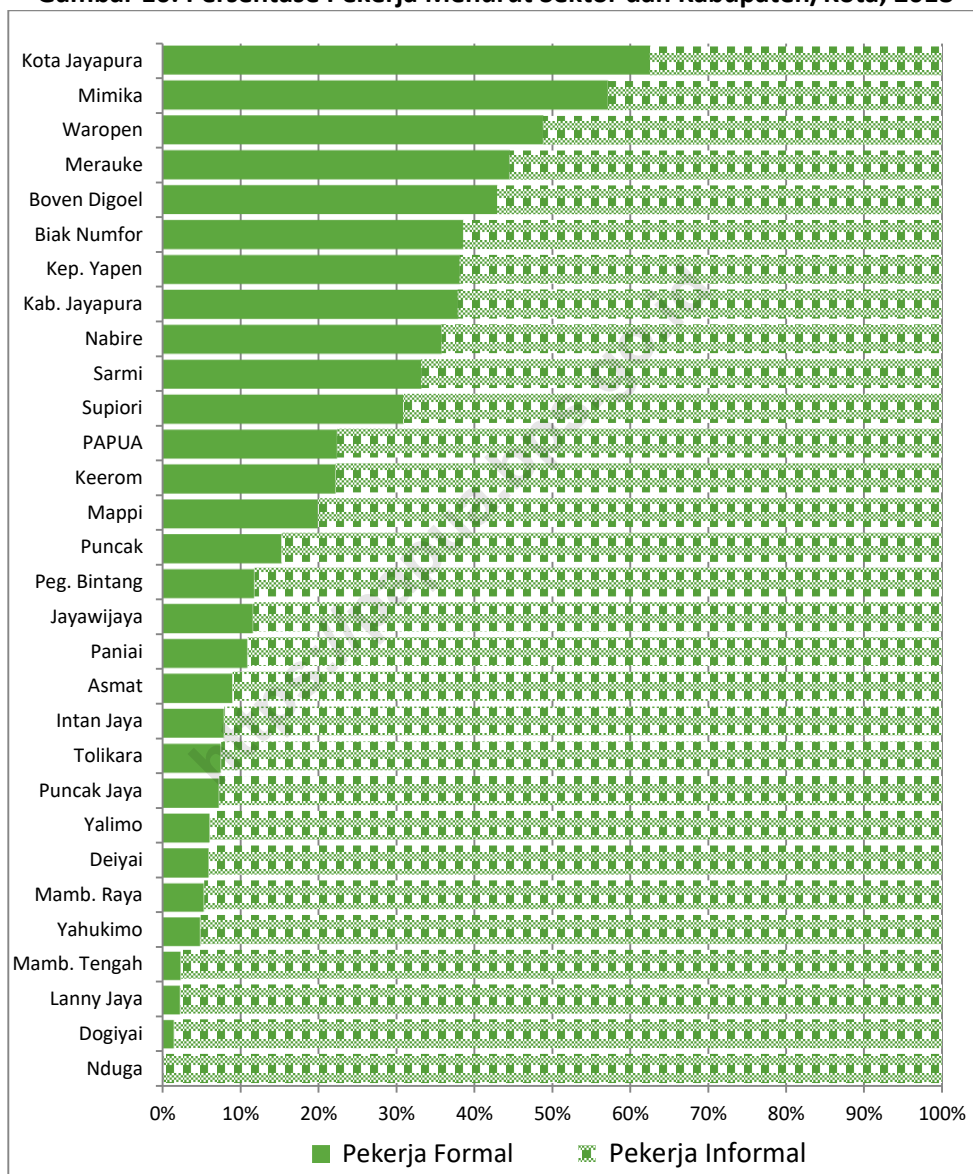
Tabel 8. Jumlah dan Persentase Pekerja Menurut Sektor, 2017-2018

Indikator	2017	%	2018	%
Penduduk 15+ yang bekerja	1.699.071	100,00	1.777.207	100,00
Laki-laki	999.310	58,82	1.031.299	58,03
Perempuan	699.761	41,18	745.908	41,97
Perkotaan	373.319	21,97	409.002	23,01
Perdesaan	1.325.752	78,03	1.368.205	76,99
Jumlah pekerja formal	370.498	21,81	397.542	22,37
Laki-laki	277.694	74,95	293.850	73,92
Perempuan	92.804	25,05	103.692	26,08
Perkotaan	222.074	59,94	237.320	59,70
Perdesaan	148.424	40,06	160.222	40,30
Jumlah pekerja informal	1.328.573	78,19	1.379.665	77,63
Laki-laki	721.616	54,32	737.449	53,45
Perempuan	606.957	45,68	642.216	46,55
Perkotaan	151.245	11,38	171.682	12,44
Perdesaan	1.177.328	88,62	1.207.983	87,56

Sumber: Sakernas 2017-2018, data diolah

Selanjutnya, gambar di bawah ini menampilkan sebaran pekerja sektor formal dan informal di masing-masing kabupaten/kota. Dapat dilihat bahwa ketimpangan yang besar antara persentase pekerja di sektor formal dan Informal di mana persentase sektor informal lebih banyak dibandingkan persentase pekerja sektor formal, Gambar 10 menampilkan diagram batang di mana sebelah kiri adalah pekerja formal dan sebelah kanan pekerna informal. Nampak bahwa secara umum kabupaten se-Papua penduduknya bekerja pada sektor informal.

Gambar 10. Persentase Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Sakernas 2018, data diolah

Catatan: Mengacu pada penentuan pekerja sektoral menggunakan proxy II

3.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, UNDEREMPLOYMENT DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja, Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja,

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran,

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator Informatif yang paling mencerminkan kondisi pasar secara umum dan kinerja pasar tenaga kerja serta ekonomi secara keseluruhan. Tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi,

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok pekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa *denominator*/ faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang istilah “angkatan kerja” dan “bekerja” kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa TPT Papua menurun pada periode Tahun 2018 terhadap Tahun 2017. Tercatat pada Tahun 2017 TPT provinsi Papua 3,62 persen kemudian menurun menjadi 3,20 persen pada Tahun 2018. Jika dipilah menurut gender maka dapat diketahui bahwa TPT pekerja laki-laki menurun dari 3,93 menjadi 3,46 demikian juga pada TPT pekerja perempuan yang menurun dari 3,17 persen menjadi 2,83 persen. Selanjutnya jika kita mengamati secara spasial yaitu menurut tempat tinggal, maka TPT pekerja di daerah perkotaan dan daerah perdesaan juga mengalami penurunan.

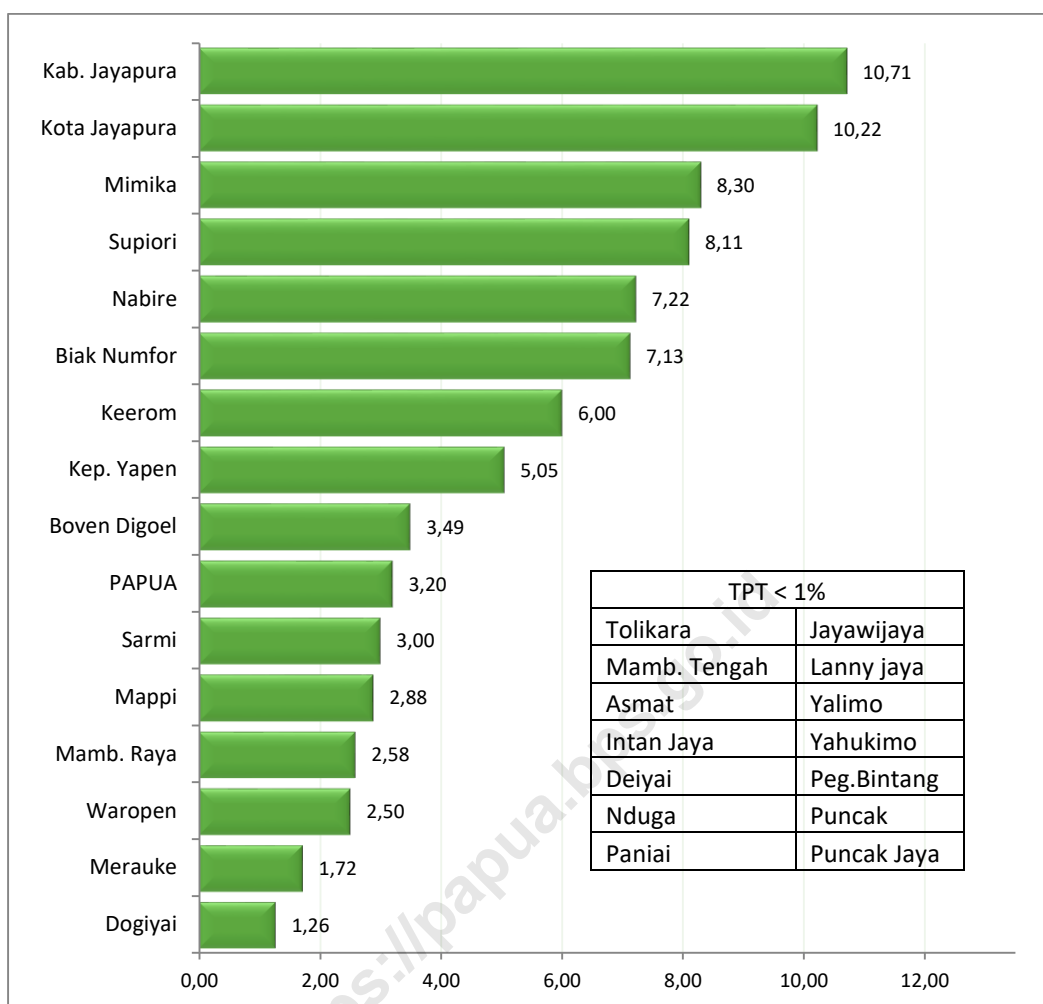
Tabel 9. Indikator Pengangguran Papua, 2017-2018

Indikator	2017	2018
Jumlah Angkatan kerja	1.762.841	1.835.963
Laki-laki	1.040.197	1.068.305
Perempuan	722.644	767.658
Perkotaan	410.350	446.455
Perdesaan	1.352.491	1.389.508
Jumlah Pengangguran	63.770	58.756
Laki-laki	40.887	37.006
Perempuan	22.883	21.750
Perkotaan	37.031	37.453
Perdesaan	26.739	21.303
TPT	3,62	3,20
Laki-laki	3,93	3,46
Perempuan	3,17	2,83
Perkotaan	9,02	8,39
Perdesaan	1,98	1,53

Sumber: Sakernas 2017-2018, data diolah

Melihat besaran TPT masing-masing kabupaten/kota, gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pada Agustus 2018, TPT tertinggi berada di Kabupaten Jayapura yaitu 10,71 persen. Sementara TPT kabupaten yang penganggurannya kurang dari satu persen antara lain: Kabupaten Tolikara, Mamberamo Tengah, Asmat, Intan Jaya, Deiyai, Nduga, Paniai, Jayawijaya, Lanny jaya, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya.

Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Sakernas 2018, data diolah

KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Pemuda

Tingkat pengangguran memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi secara aktif mencari pekerjaan dan bersedia untuk bekerja. Pemuda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “pemuda” mencakup orang yang berusia 16 sampai 30 tahun, sedangkan “orang dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berusia 31 tahun ke atas.

Pengangguran pada kelompok usia muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara, yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “usia muda” mencakup orang yang berusia 15-24 tahun, sedangkan “orang dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berusia 25 tahun ke atas, Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa

3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total

4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa pada periode Agustus 2017 ke Agustus 2018, terjadi penurunan TPT usia muda. Sakernas menunjukkan bahwa TPT usia muda turun dari 12,09 persen menjadi 10,32 persen. Hal serupa terjadi pada TPT penduduk usia muda laki-laki dan perempuan yang masing-masing mengalami penurunan dari 13,83 persen menjadi 11,53 persen dan 9,67 persen menjadi 8,62 persen pada tahun 2018. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT usia muda di wilayah perkotaan telah mengalami penurunan dari periode 2017 sekitar 35,20 persen menjadi sekitar 28,36 persen pada Agustus 2018.

Tabel 10. Indikator Pengangguran Usia Muda di Provinsi Papua, 2017-2018

Indikator	2017	2018
TPT Penduduk Umur Muda (%)	12,09	10,32
LAKI-LAKI	13,83	11,53
PEREMPUAN	9,67	8,62
PERKOTAAN	35,20	28,36
PERDESAAN	6,68	5,47
RASIO TPT Umur Muda Terhadap TPT Dewasa	6,34	9,57
LAKI-LAKI	6,95	8,25
PEREMPUAN	5,31	12,05
PERKOTAAN	7,22	9,77
PERDESAAN	6,95	7,47
Share Penganggur Muda Terhadap Total Penganggur (%)	56,15	53,35
LAKI-LAKI	37,35	34,94
PEREMPUAN	18,80	18,41
PERKOTAAN	30,99	31,08
PERDESAAN	25,16	22,26

Sumber: Sakernas 2017-2018, data diolah

Ketika melihat *share* penganggur muda terhadap total penganggur, tampak bahwa masih banyak penganggur diusia muda di Provinsi Papua. Data menunjukkan bahwa penganggur muda memiliki *share* sebesar 56,15 persen pada Agustus 2017 dan menurun menjadi sekitar 53,35 persen pada Agustus 2018.

Melihat Share penganggur usia muda terhadap total penganggur, angka yang cukup besar menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia muda sudah masuk dalam angkatan kerja. Besar kemungkinannya mereka yang telah lulus pendidikan masih mencari pekerjaan untuk mencari pengalaman

KILM 11. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan pekerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi pekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada resiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan yang lebih rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Tabel berikut ini menunjukkan bahwa, pada Agustus 2018 TPT tertinggi menurut pendidikan adalah pada jenjang Sekolah Tinggi dengan besaran mencapai 6,40 persen, disusul tingkat pendidikan sekolah Menengah, sekolah dasar dan terendah adalah mereka yang tidak pernah sekolah. Dengan menganalisa data TPT pekerja berdasarkan tingkat pendidikan, maka diperoleh gambaran bahwa mereka yang berpendidikan tinggi cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan atau penguasaannya, Atau bisa juga berdasarkan nilai *income* yang akan diperoleh dari pekerjaan yang dipilih. Selanjutnya semakin rendah tingkat pendidikan maka kemungkinan untuk memilih pekerjaan sesuai selera semakin kecil. Mengenai perubahan yang terjadi, dapat diamati pada periode Agustus 2017 ke Agustus 2018 Tabel 11.

Tabel 11. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2017-2018

Indikator	2017	2018
TOTAL	3,62	3,20
KURANG DARI SD	0,95	0,87
LAKI-LAKI	1,32	1,22
PEREMPUAN	0,62	0,56
PERKOTAAN	4,16	5,33
PERDESAAN	0,81	0,65
SEKOLAH DASAR	1,59	1,27
LAKI-LAKI	1,75	1,58
PEREMPUAN	1,36	0,86
PERKOTAAN	1,95	2,96
PERDESAAN	1,52	0,96
SEKOLAH MENENGAH	6,88	5,87
LAKI-LAKI	6,34	5,54
PEREMPUAN	8,35	6,73
PERKOTAAN	11,51	10,01
PERDESAAN	3,92	3,11
SEKOLAH TINGGI	7,01	6,40
LAKI-LAKI	5,89	4,61
PEREMPUAN	8,89	9,04
PERKOTAAN	7,98	7,78
PERDESAAN	5,39	3,93

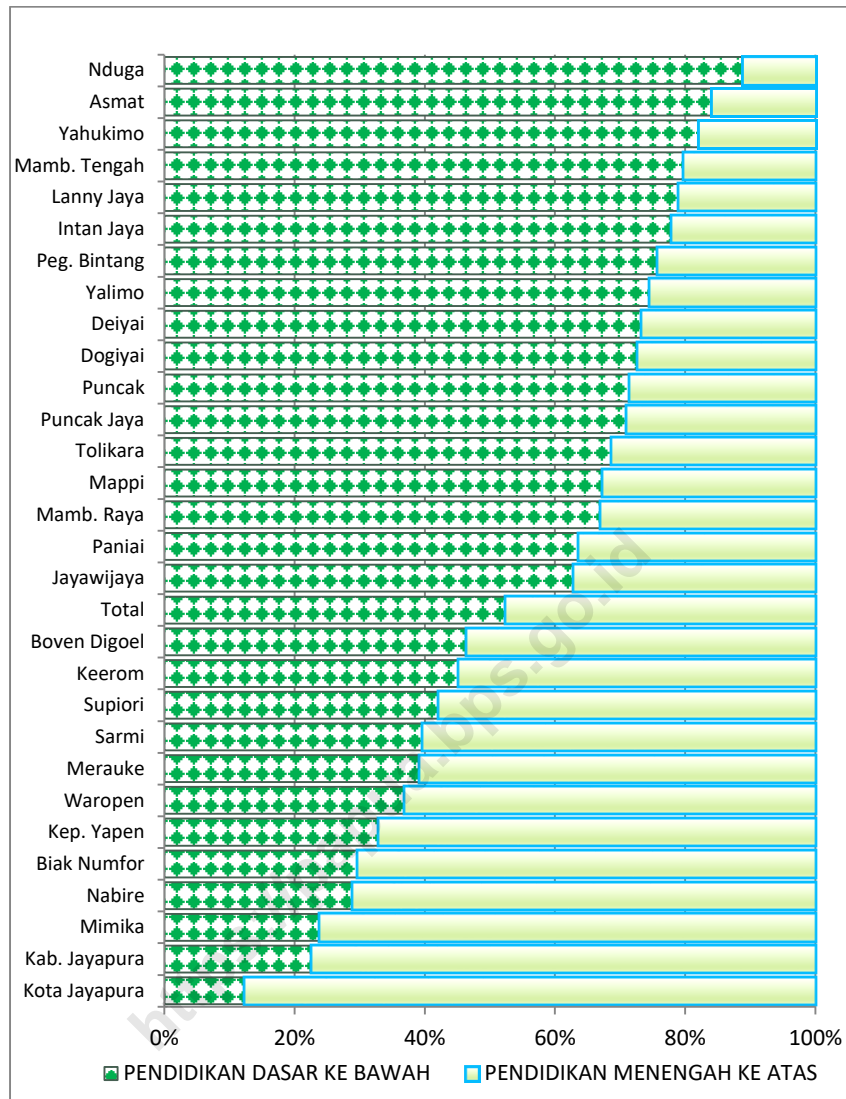
Sumber: Sakernas 2017-2018, data diolah

Sakernas menunjukkan bahwa TPT Tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan pada semua jenjang Tingkat pendidikan.

Jika dipisahkan menurut jenis kelamin, pada Agustus 2018 jenjang pendidikan Sekolah Menengah dan Sekolah Tinggi, nilai TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki, Namun pada jenjang pendidikan yang lebih rendah yaitu Sekolah Dasar dan Tidak Pernah Sekolah, TPT laki-laki hampir sama jika dibandingkan dengan TPT perempuan.

Sebaran nilai TPT berdasarkan kabupaten/kota, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada grafik tersebut tingkat pendidikan dibedakan menjadi dua yakni pendidikan dasar ke bawah dan pendidikan menengah ke atas.

Gambar 12. Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Sakernas 2018, data diolah

Tampak pada grafik bahwa lebih dari 80 persen pengangguran di Kabupaten Yahukimo, Asmat, dan Nduga didominasi oleh pengangguran dengan tingkat pendidikan dasar ke bawah. Perlu kehati-hatian dalam menganalisa grafik persentase pengangguran ini. Seperti diketahui bahwa angka pengangguran di kabupaten/kota cukup rendah khususnya di wilayah pegunungan papua. Hal ini dapat terjadi karena dalam konsep melakukan kegiatan seminggu yang lalu dengan tujuan memperoleh keuntungan/hasil dengan kriteria minimal 1 jam tanpa terputus dalam seminggu, maka aktivitas tersebut termasuk dalam kategori bekerja. Dengan demikian, aktivitas penduduk yang secara umum berada disektor pertanian akan terserap oleh aktifitas perekonomian yang produktif.

KILM 12. Setengah Penganggur

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan untuk menambah jumlah jam kerjanya. Pada Agustus 2017 tercatat total setengah pengangguran di Provinsi Papua mencapai 699.922 jiwa. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan keadaan Agustus 2018 yang mencapai 740.469 jiwa. Dari total setengah pengangguran tersebut terdapat 374.710 laki-laki dan sisanya sebanyak 365.759 adalah perempuan. Sebagian besar setengah pengangguran tinggal di perdesaan yang mencapai 667.831 jiwa.

Persentase setengah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja mencapai kisaran 39,70 persen pada Agustus 2017 yang lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2018 sebesar 40,33 persen. Begitu juga dengan proporsi setengah penganggur dan total penduduk kerja. Pada periode yang sama terjadi peningkatan. Setengah pengangguran terhadap total penduduk bekerja meningkat dari 41,19 persen pada Agustus 2017 menjadi 41,66 persen pada Agustus 2018.

Tabel 12. Indikator Setengah Penganggur, 2017-2018

Indikator	2017	2018
Persentase Setengah Penganggur Terhadap Angkatan Kerja	39,70	40,33
LAKI-LAKI	34,40	35,08
PEREMPUAN	47,34	47,65
PERKOTAAN	16,38	16,27
PERDESAAN	46,78	48,06
Persentase Setengah Penganggur Terhadap Total Penduduk Bekerja	41,19	41,66
LAKI-LAKI	35,81	36,33
PEREMPUAN	48,89	49,04
PERKOTAAN	18,00	17,76
PERDESAAN	47,72	48,81

Sumber: Sakernas 2017-2018, data diolah

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan

kerja, jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK (1-TPAK),

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai “buruk”, misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, Misalnya, perempuan sebagai kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama,

Tabel 13. Indikator Ketidakaktifan, 2017-2018

Indikator	2017	2018
Penduduk 15 tahun ke atas	2.291.111	2.320.862
Laki-laki	1.219.678	1.236.571
Perempuan	1.071.433	1.084.291
Perkotaan	659.439	683.284
Perdesaan	1.631.672	1.637.578
Bukan angkatan kerja	528.270	484.899
Laki-laki	179.481	168.266
Perempuan	348.789	316.633
Perkotaan	249.089	236.829
Perdesaan	279.181	248.070
Tingkat ketidakaktifan	23,06	20,89
Laki-laki	14,72	13,61
Perempuan	32,55	29,20
Perkotaan	37,77	34,66
Perdesaan	17,11	15,15

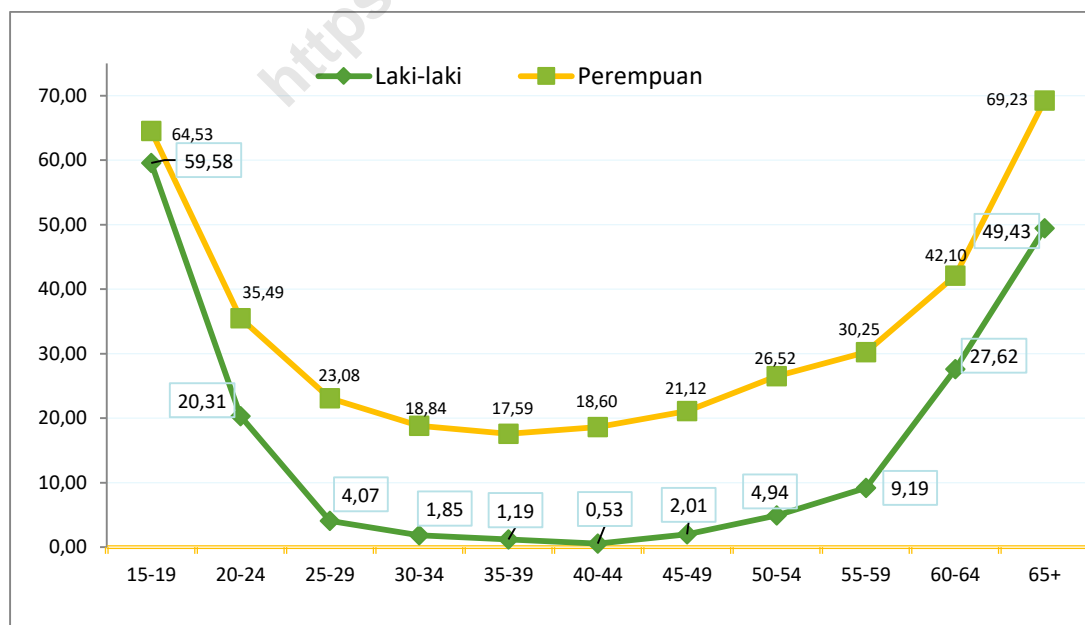
Sumber: Sakernas 2017-2018, data diolah

Pada periode Agustus 2017-2018 tingkat ketidakaktifan secara umum berbeda signifikan. Hal ini nampak dari kondisi 2017 sebesar 23,06 persen menurun secara nyata menjadi 20,89 persen pada 2018. Berdasarkan Jenis Kelamin, laki-laki mengalami penurunan yang relatif kecil pada tingkat ketidakaktifan dari 14,72 persen di Agustus 2017 menjadi 13,61 persen pada Agustus 2018. Demikian hal yang sama pada penduduk perempuan menurun dari 32,55 persen pada Agustus 2017 menjadi 29,20 persen pada Agustus 2018.

Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, penduduk perkotaan mengalami penurunan tingkat ketidakaktifan dari 37,77 persen pada Agustus 2017 menjadi 34,66 persen pada Agustus 2018. Penurunan serupa juga terjadi di wilayah perdesaan yaitu semula 17,11 menjadi 15,15 pada tahun 2018.

Informasi lain terkait pola ketidakaktifan menurut kelompok umur dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dapat dilihat bahwa pola ketidakaktifan yang berbentuk huruf “U” mengindikasikan tingginya ketidakaktifan pada penduduk usia muda, lalu turun pada usia produktif dan kembali meningkat pada lansia. Pola ini terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, namun dapat dilihat bahwa pada laki-laki, semakin menuju ke usia produktif, maka semakin curam grafiknya atau dengan kata lain tingkat ketidakaktifannya semakin rendah berbeda pada wanita yang tidak lebih curam dibandingkan pada laki-laki.

Gambar 13. Pola Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2018



Sumber: Sakernas 2018, data diolah

3.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kemampuan penduduk di suatu negara dalam bersaing di pasar dunia demi membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tinggi).

Tabel 14. Indikator Ketidakaktifan Menurut Pendidikan, 2017-2018

Indikator	2017	2018
Tidak pernah sekolah	12,49	10,68
Laki-laki	8,50	7,33
Perempuan	15,71	13,38
Perkotaan	37,76	34,09
Perdesaan	10,95	9,10
Sekolah dasar	27,26	26,72
Laki-laki	16,35	18,26
Perempuan	38,66	35,47
Perkotaan	46,36	43,47
Perdesaan	21,98	22,61
Sekolah menengah	33,44	29,61
Laki-laki	20,01	17,53
Perempuan	54,18	48,82
Perkotaan	42,96	39,49
Perdesaan	25,48	21,03
Sekolah tinggi	10,63	5,93
Laki-laki	6,28	5,93
Perempuan	17,07	17,57
Perkotaan	14,03	13,85
Perdesaan	4,30	5,44

Sumber: Sakernas 2017-2018, data diolah

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018 menunjukkan tidak adanya perubahan komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan. Komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan antara Agustus 2017 ke Agustus 2018 relatif tidak mengalami perubahan berarti yaitu masih didominasi oleh jenjang pendidikan Sekolah Menengah.

Apabila dibedakan menurut gender, maka secara umum perubahan indikator Ketidakaktifan pada setiap level pendidikan tidak begitu berbeda jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan penduduk perempuan cenderung stabil pada seluruh jenjang pendidikan.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal maka pada periode yang sama, tingkat ketidakaktifan penduduk di wilayah perkotaan berkurang sekitar 3,67 persen pada kategori tidak pernah sekolah. Penurunan juga terjadi pada jenjang pendidikan sekolah tinggi secara umum. Namun, terjadi kenaikan ketidakaktifan pada level pendidikan sekolah tinggi di wilayah perdesaaan sebesar 1,14 persen. Untuk wilayah perkotaan justru variasi persentase ketidakaktifan menurun dengan signifikan. Hal itu juga mengindikasikan bahwa jumlah penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) cenderung meningkat secara proporsional terhadap bertambahnya jumlah penduduk usia kerja.

L A M P I R A N

<https://papua.bps.go.id>

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	85.770	78.821	164.591
Jayawijaya	80.171	73.116	153.287
Kab. Jayapura	50.126	42.917	93.043
Nabire	58.560	49.787	108.347
Kep. Yapen	34.755	33.031	67.786
Biak Numfor	54.354	50.787	105.141
Paniai	58.381	53.872	112.253
Puncak Jaya	54.404	41.515	95.919
Mimika	90.747	65.466	156.213
Boven Digoel	25.952	19.667	45.619
Mappi	31.330	30.216	61.546
Asmat	30.750	27.575	58.325
Yahukimo	67.065	63.167	130.232
Peg. Bintang	25.760	23.185	48.945
Tolikara	50.723	43.272	93.995
Sarmi	15.831	12.379	28.210
Keerom	22.684	17.813	40.497
Waropen	11.411	9.996	21.407
Supiori	7.187	6.119	13.306
Mamb. Raya	7.721	6.923	14.644
Nduga	34.408	28.073	62.481
Lanny Jaya	61.372	58.757	120.129
Mamb. Tengah	17.357	16.113	33.470
Yalimo	23.324	18.983	42.307
Puncak	40.712	36.529	77.241
Dogiyai	31.794	31.252	63.046
Intan Jaya	17.263	17.500	34.763
Deiyai	23.020	24.730	47.750
Kota Jayapura	123.639	102.730	226.369
Prov. Papua	1.236.571	1.084.291	2.320.862

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 dan 2018

Indikator	2017	2018
15 Tahun ke atas	2.291.111	2.320.862
Laki-laki	1.219.678	1.236.571
Perempuan	1.071.433	1.084.291
Perkotaan	659.439	683.284
Perdesaan	1.631.672	1.637.578
(15-24)	543.178	549.132
Laki-laki	293.802	297.593
Perempuan	249.376	251.539
Perkotaan	162.254	170.758
Perdesaan	380.924	378.374
(15-64)	1.698.242	2.268.964
Laki-laki	897.297	1.206.651
Perempuan	800.945	1.062.313
Perkotaan	475.397	659.250
Perdesaan	1.222.845	1.609.714
(25-54)	1.548.429	1.556.537
Laki-laki	810.394	813.425
Perempuan	738.035	743.112
Perkotaan	421.470	430.402
Perdesaan	1.126.959	1.126.135
(25-34)	625.041	614.852
Laki-laki	313.008	318.329
Perempuan	312.033	296.523
Perkotaan	171.432	177.474
Perdesaan	453.609	437.378
(35-54)	923.388	941.685
Laki-laki	497.386	495.096
Perempuan	426.002	446.589
Perkotaan	250.038	252.928
Perdesaan	673.350	688.757
(55-64)	149.813	163.295
Laki-laki	86.903	95.633
Perempuan	62.910	67.662
Perkotaan	53.927	58.090
Perdesaan	95.886	105.205
65 Tahun ke atas	49.691	51.898
Laki-laki	28.579	29.920
Perempuan	21.112	21.978
Perkotaan	21.788	24.034
Perdesaan	27.903	27.864

Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	70.789	43.733	114.522
Jayawijaya	73.553	63.644	137.197
Kab, Jayapura	38.969	25.801	64.770
Nabire	49.865	28.559	78.424
Kep, Yapen	27.651	15.681	43.332
Biak Numfor	41.175	23.015	64.190
Paniai	54.252	45.841	100.093
Puncak Jaya	51.126	39.319	90.445
Mimika	79.205	28.398	107.603
Boven Digoel	23.383	13.605	36.988
Mappi	28.034	19.769	47.803
Asmat	26.693	21.622	48.315
Yahukimo	60.785	50.015	110.800
Peg, Bintang	23.132	19.575	42.707
Tolikara	48.123	41.320	89.443
Sarmi	13.422	6.819	20.241
Keerom	19.557	10.213	29.770
Waropen	9.024	3.606	12.630
Supiori	5.474	2.273	7.747
Mamb, Raya	6.773	3.402	10.175
Nduga	31.224	26.227	57.451
Lanny Jaya	56.938	54.175	111.113
Mamb, Tengah	16.489	15.487	31.976
Yalimo	19.699	16.615	36.314
Puncak	38.249	34.692	72.941
Dogiyai	28.054	26.280	54.334
Intan Jaya	14.343	11.269	25.612
Deiyai	20.896	21.815	42.711
Kota Jayapura	91.428	54.888	146.316
PROV.PAPUA	1.068.305	767.658	1.835.963

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2017-2018

Indikator	2017	2018
15 Tahun ke atas	1.762.841	1.835.963
Laki-laki	1.040.197	1.068.305
Perempuan	722.644	767.658
Perkotaan	410.350	446.455
Perdesaan	1.352.491	1.389.508
(15-24)	296.179	303.623
Laki-laki	172.139	178.101
Perempuan	124.040	125.522
Perkotaan	56.132	64.406
Perdesaan	240.047	239.217
(15-64)	1.743.585	1.814.071
Laki-laki	1.027.605	1.053.175
Perempuan	715.980	760.896
Perkotaan	405.465	439.968
Perdesaan	1.338.120	1.374.103
(25-54)	1.341.391	1.385.727
Laki-laki	784.975	794.669
Perempuan	556.416	591.058
Perkotaan	320.142	338.418
Perdesaan	1.021.249	1.047.309
(25-34)	536.077	543.112
Laki-laki	300.844	308.876
Perempuan	235.233	234.236
Perkotaan	126.820	138.268
Perdesaan	409.257	404.844
(35-54)	805.314	842.615
Laki-laki	484.131	485.793
Perempuan	321.183	356.822
Perkotaan	193.322	200.150
Perdesaan	611.992	642.465
(55-64)	106.015	124.721
Laki-laki	70.491	80.405
Perempuan	35.524	44.316
Perkotaan	29.191	37.144
Perdesaan	76.824	87.577
65 Tahun ke atas	19.256	21.892
Laki-laki	12.592	15.130
Perempuan	6.664	6.762
Perkotaan	4.885	6.487
Perdesaan	14.371	15.405

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	82,53	55,48	69,58
Jayawijaya	91,75	87,05	89,50
Kab. Jayapura	77,74	60,12	69,61
Nabire	85,15	57,36	72,38
Kep. Yapen	79,56	47,47	63,92
Biak Numfor	75,75	45,32	61,05
Paniai	92,93	85,09	89,17
Puncak Jaya	93,97	94,71	94,29
Mimika	87,28	43,38	68,88
Boven Digoel	90,10	69,18	81,08
Mappi	89,48	65,43	77,67
Asmat	86,81	78,41	82,84
Yahukimo	90,64	79,18	85,08
Peg. Bintang	89,80	84,43	87,26
Tolikara	94,87	95,49	95,16
Sarmi	84,78	55,09	71,75
Keerom	86,21	57,33	73,51
Waropen	79,08	36,07	59,00
Supiori	76,17	37,15	58,22
Mamb. Raya	87,72	49,14	69,48
Nduga	90,75	93,42	91,95
Lanny Jaya	92,78	92,20	92,49
Mamb. Tengah	95,00	96,11	95,54
Yalimo	84,46	87,53	85,83
Puncak	93,95	94,97	94,43
Dogiyai	88,24	84,09	86,18
Intan Jaya	83,09	64,39	73,68
Deiyai	90,77	88,21	89,45
Kota Jayapura	73,95	53,43	64,64
PROV. PAPUA	86,39	70,80	79,11

Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	70.011	42.546	112.557
Jayawijaya	72.863	63.443	136.306
Kab, Jayapura	34.879	22.951	57.830
Nabire	45.946	26.813	72.759
Kep, Yapen	26.494	14.650	41.144
Biak Numfor	37.946	21.669	59.615
Paniai	53.900	45.592	99.492
Puncak Jaya	50.607	39.011	89.618
Mimika	72.280	26.395	98.675
Boven Digoel	22.369	13.327	35.696
Mappi	27.522	18.904	46.426
Asmat	26.568	21.510	48.078
Yahukimo	60.334	49.509	109.843
Peg, Bintang	22.898	19.434	42.332
Tolikara	47.975	41.320	89.295
Sarmi	12.980	6.654	19.634
Keerom	18.352	9.631	27.983
Waropen	8.752	3.562	12.314
Supiori	4.959	2.160	7.119
Mamb, Raya	6.728	3.184	9.912
Nduga	30.884	26.227	57.111
Lanny Jaya	56.343	54.008	110.351
Mamb, Tengah	16.390	15.487	31.877
Yalimo	19.484	16.524	36.008
Puncak	38.027	34.258	72.285
Dogiyai	27.367	26.280	53.647
Intan Jaya	14.213	11.269	25.482
Deiyai	20.779	21.682	42.461
Kota Jayapura	83.449	47.908	131.357
PROV, PAPUA	1.031.299	745.908	1.777.207

Lampiran 7. Ratio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	81,63	53,98	68,39
Jayawijaya	90,88	86,77	88,92
Kab, Jayapura	69,58	53,48	62,15
Nabire	78,46	53,86	67,15
Kep, Yapen	76,23	44,35	60,70
Biak Numfor	69,81	42,67	56,70
Paniai	92,32	84,63	88,63
Puncak Jaya	93,02	93,97	93,43
Mimika	79,65	40,32	63,17
Boven Digoel	86,19	67,76	78,25
Mappi	87,85	62,56	75,43
Asmat	86,40	78,01	82,43
Yahukimo	89,96	78,38	84,34
Peg, Bintang	88,89	83,82	86,49
Tolikara	94,58	95,49	95,00
Sarmi	81,99	53,75	69,60
Keerom	80,90	54,07	69,10
Waropen	76,70	35,63	57,52
Supiori	69,00	35,30	53,50
Mamb, Raya	87,14	45,99	67,69
Nduga	89,76	93,42	91,41
Lanny Jaya	91,81	91,92	91,86
Mamb, Tengah	94,43	96,11	95,24
Yalimo	83,54	87,05	85,11
Puncak	93,40	93,78	93,58
Dogiyai	86,08	84,09	85,09
Intan Jaya	82,33	64,39	73,30
Deiyai	90,26	87,67	88,92
Kota Jayapura	67,49	46,63	58,03
PROV. PAPUA	83,40	68,79	76,58

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2018

Kabupaten/kota	Bekerja dengan upah/gaji	Pengusaha	Berusaha sendiri+Berusaha dibantu buruh tak tetap/Tak dibayar
Merauke	46.800	3.264	37.558
Jayawijaya	15.112	736	57.694
Kab, Jayapura	21.320	575	25.607
Nabire	23.631	2.396	35.219
Kep, Yapen	15.046	633	16.848
Biak Numfor	22.448	536	24.211
Paniai	10.851	-	58.167
Puncak Jaya	6.415	71	36.129
Mimika	52.998	3.375	36.577
Boven Digoel	14.435	888	13.052
Mappi	8.486	781	27.620
Asmat	4.241	74	25.802
Yahukimo	4.575	770	47.235
Peg, Bintang	4.783	199	17.618
Tolikara	6.158	550	38.639
Sarmi	6.009	501	7.621
Keerom	6.037	175	14.310
Waropen	5.968	40	6.115
Supiori	2.141	56	3.906
Mamb, Raya	497	30	5.702
Nduga	-	-	27.259
Lanny Jaya	2.514	-	57.615
Mamb, Tengah	755	-	14.129
Yalimo	2.185	-	15.564
Puncak	10.675	362	27.580
Dogiyai	804	-	31.330
Intan Jaya	850	1.171	13.452
Deiyai	2.531	-	22.828
Kota Jayapura	77.631	4.463	40.451
PROV. PAPUA	375.896	21.646	785.838

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2018 (Lanjutan...)

Kabupaten/kota	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga	Pekerja Rentan
Merauke	2.987	21.948	62.493
Jayawijaya	-	62.764	120.458
Kab, Jayapura	1.762	8.566	35.935
Nabire	640	10.873	46.732
Kep, Yapen	105	8.512	25.465
Biak Numfor	2.550	9.870	36.631
Paniai	-	30.474	88.641
Puncak Jaya	-	47.003	83.132
Mimika	1.437	4.288	42.302
Boven Digoel	1.325	5.996	20.373
Mappi	377	9.162	37.159
Asmat	235	17.726	43.763
Yahukimo	-	57.263	104.498
Peg, Bintang	-	19.732	37.350
Tolikara	990	42.958	82.587
Sarmi	1.064	4.439	13.124
Keerom	273	7.188	21.771
Waropen	47	144	6.306
Supiori	50	966	4.922
Mamb, Raya	41	3.642	9.385
Nduga	-	29.852	57.111
Lanny Jaya	-	50.222	107.837
Mamb, Tengah	-	16.993	31.122
Yalimo	-	18.259	33.823
Puncak	-	33.668	61.248
Dogiyai	721	20.792	52.843
Intan Jaya	-	10.009	23.461
Deiyai	192	16.910	39.930
Kota Jayapura	875	7.937	49.263
PROV. PAPUA	15.671	578.156	1.379.665

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2018

Kabupaten/kota	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
Merauke	52.028	15.010	45.519
Jayawijaya	109.453	1.689	25.164
Kab, Jayapura	22.366	6.447	29.017
Nabire	28.184	8.310	36.265
Kep, Yapen	21.226	5.578	14.340
Biak Numfor	22.099	6.706	30.810
Paniai	80.380	89	19.023
Puncak Jaya	81.124	111	8.383
Mimika	15.321	22.639	60.715
Boven Digoel	16.622	7.013	12.061
Mappi	32.849	1.110	12.467
Asmat	40.343	1.697	6.038
Yahukimo	103.501	427	5.915
Peg, Bintang	36.998	146	5.188
Tolikara	80.037	339	8.919
Sarmi	9.108	1.124	9.402
Keerom	19.744	1.443	6.796
Waropen	3.964	632	7.718
Supiori	4.111	529	2.479
Mamb, Raya	9.027	-	885
Nduga	57.111	-	-
Lanny Jaya	107.138	-	3.213
Mamb, Tengah	31.122	-	755
Yalimo	33.850	-	2.158
Puncak	60.878	1.441	9.966
Dogiyai	52.673	-	974
Intan Jaya	24.113	-	1.369
Deiyai	39.200	325	2.936
Kota Jayapura	9.546	13.037	108.774
PROV, PAPUA	1.204.116	95.842	477.249

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2018

Kabupaten/kota	Pekerja Paruh Waktu	Tingkat Pekerja Paruh Waktu	Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu (Persen)
Merauke	27.169	27,39	40,37
Jayawijaya	52.087	37,19	40,40
Kab, Jayapura	13.237	30,37	39,36
Nabire	22.668	34,49	40,20
Kep, Yapen	18.414	43,85	60,42
Biak Numfor	20.106	35,10	43,55
Paniai	42.624	40,10	44,69
Puncak Jaya	54.796	66,48	70,99
Mimika	12.730	13,84	25,86
Boven Digoel	8.580	28,57	44,19
Mappi	18.804	40,35	54,86
Asmat	25.955	53,52	77,71
Yahukimo	49.848	44,88	50,80
Peg, Bintang	12.760	29,31	41,81
Tolikara	51.334	60,81	64,30
Sarmi	13.241	73,77	78,24
Keerom	13.054	45,75	59,04
Waropen	3.147	29,19	27,30
Supiori	3.178	38,38	54,07
Mamb, Raya	8.735	91,59	100,00
Nduga	17.082	30,22	19,27
Lanny Jaya	31.305	27,80	21,50
Mamb, Tengah	27.825	89,68	82,66
Yalimo	2.941	12,32	9,99
Puncak	48.566	70,92	90,94
Dogiyai	41.687	74,77	75,50
Intan Jaya	12.650	49,65	59,09
Deiyai	27.050	64,73	67,31
Kota Jayapura	18.349	15,86	21,26
PROV. PAPUA	699.922	41,19	48,89

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2018

Kabupaten/kota	0 JAM*	1-14 JAM	15-24 JAM
Merauke	3204	9565	16394
Jayawijaya	0	5599	7228
Kab, Jayapura	1981	4090	8256
Nabire	1950	1939	8284
Kep, Yapen	598	1512	6227
Biak Numfor	1285	2147	6540
Paniai	0	24645	18456
Puncak Jaya	5013	19924	47596
Mimika	291	3124	3991
Boven Digoel	964	1665	4199
Mappi	1105	3245	6700
Asmat	170	2959	9532
Yahukimo	0	751	12420
Peg, Bintang	564	1198	7959
Tolikara	927	997	9929
Sarmi	438	6276	5512
Keerom	857	1415	3869
Waropen	0	361	1349
Supiori	105	364	1146
Mamb, Raya	26	5047	2969
Nduga	0	649	2357
Lanny Jaya	0	3071	5454
Mamb, Tengah	0	953	5971
Yalimo	0	345	2379
Puncak	0	653	38255
Dogiyai	0	2028	8258
Intan Jaya	41	1850	3207
Deiyai	0	6144	9596
Kota Jayapura	3230	2812	4258
PROV. PAPUA	22749	115328	268291

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2017 (Lanjutan)

Kabupaten/kota	25-34 JAM	35-39 JAM	40-48 JAM
Merauke	13126	11186	33158
Jayawijaya	41935	40009	38800
Kab, Jayapura	10761	7742	11539
Nabire	15219	10672	21293
Kep, Yapen	9033	6553	8044
Biak Numfor	9175	10871	19998
Paniai	11407	8120	26125
Puncak Jaya	11925	3057	1642
Mimika	6920	7084	26132
Boven Digoel	6729	6027	6543
Mappi	7834	8300	10654
Asmat	13722	8064	10770
Yahukimo	32863	33756	26712
Peg, Bintang	7573	11270	11303
Tolikara	36832	20570	15740
Sarmi	4409	1423	1084
Keerom	6593	3998	6143
Waropen	1302	1196	4973
Supiori	1847	1344	1673
Mamb, Raya	1594	86	157
Nduga	10348	19348	18642
Lanny Jaya	18840	40699	41718
Mamb, Tengah	14750	6735	3210
Yalimo	3076	10624	19183
Puncak	18207	12079	2986
Dogiyai	19146	15525	4969
Intan Jaya	6151	6977	6968
Deiyai	8548	6614	11228
Kota Jayapura	6985	13796	45824
PROV. PAPUA	356850	333725	437211

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2017 (Lanjutan)

Kabupaten/kota	49-59 JAM	60 JAM KE ATAS
Merauke	15883	10041
Jayawijaya	1722	1013
Kab, Jayapura	6452	7009
Nabire	7687	5715
Kep, Yapen	3583	5594
Biak Numfor	2827	6772
Paniai	7602	3137
Puncak Jaya	390	71
Mimika	23525	27608
Boven Digoel	5096	4473
Mappi	5598	2990
Asmat	2137	724
Yahukimo	1585	1756
Peg, Bintang	2262	203
Tolikara	3538	762
Sarmi	210	282
Keerom	3066	2042
Waropen	1573	1560
Supiori	142	498
Mamb, Raya	33	0
Nduga	5767	0
Lanny Jaya	569	0
Mamb, Tengah	258	0
Yalimo	401	0
Puncak	32	73
Dogiyai	2760	961
Intan Jaya	149	139
Deiyai	267	64
Kota Jayapura	25232	29220
PROV, PAPUA	130346	112707

Ket: - : Not Available) Data tidak tersedia.

Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal, 2018

Kabupaten/kota	FORMAL	INFORMAL
Merauke	44,5%	55,5%
Jayawijaya	11,6%	88,4%
Kab, Jayapura	37,9%	62,1%
Nabire	35,8%	64,2%
Kep, Yapen	38,1%	61,9%
Biak Numfor	38,6%	61,4%
Paniai	10,9%	89,1%
Puncak Jaya	7,2%	92,8%
Mimika	57,1%	42,9%
Boven Digoel	42,9%	57,1%
Mappi	20,0%	80,0%
Asmat	9,0%	91,0%
Yahukimo	4,9%	95,1%
Peg, Bintang	11,8%	88,2%
Tolikara	7,5%	92,5%
Sarmi	33,2%	66,8%
Keerom	22,2%	77,8%
Waropen	48,8%	51,2%
Supiori	30,9%	69,1%
Mamb, Raya	5,3%	94,7%
Nduga	0,0%	100,0%
Lanny Jaya	2,3%	97,7%
Mamb, Tengah	2,4%	97,6%
Yalimo	6,1%	93,9%
Puncak	15,3%	84,7%
Dogiyai	1,5%	98,5%
Intan Jaya	7,9%	92,1%
Deiyai	6,0%	94,0%
Kota Jayapura	62,5%	37,5%
PROV. PAPUA	22,4%	77,6%

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin, 2018

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	1,10	2,71	1,72
Jayawijaya	0,94	0,32	0,65
Kab, Jayapura	10,50	11,05	10,71
Nabire	7,86	6,11	7,22
Kep, Yapen	4,18	6,57	5,05
Biak Numfor	7,84	5,85	7,13
Paniai	0,65	0,54	0,60
Puncak Jaya	1,02	0,78	0,91
Mimika	8,74	7,05	8,30
Boven Digoel	4,34	2,04	3,49
Mappi	1,83	4,38	2,88
Asmat	0,47	0,52	0,49
Yahukimo	0,74	1,01	0,86
Peg, Bintang	1,01	0,72	0,88
Tolikara	0,31	0,00	0,17
Sarmi	3,29	2,42	3,00
Keerom	6,16	5,70	6,00
Waropen	3,01	1,22	2,50
Supiori	9,41	4,97	8,11
Mamb, Raya	0,66	6,41	2,58
Nduga	1,09	0,00	0,59
Lanny Jaya	1,04	0,31	0,69
Mamb, Tengah	0,60	0,00	0,31
Yalimo	1,09	0,55	0,84
Puncak	0,58	1,25	0,90
Dogiyai	2,45	0,00	1,26
Intan Jaya	0,91	0,00	0,51
Deiyai	0,56	0,61	0,59
Kota Jayapura	8,73	12,72	10,22
PROV. PAPUA	3,46	2,83	3,20

Ket: - : Not Available) Data tidak tersedia.

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018

Kabupaten/kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	0,38	3,09	1,41
Jayawijaya	0,00	2,16	0,78
Kab. Jayapura	4,33	12,62	11,61
Nabire	4,95	7,94	8,58
Kep. Yapen	1,52	6,09	8,35
Biak Numfor	1,06	8,73	13,26
Paniai	0,33	0,47	4,27
Puncak Jaya	0,86	1,23	0,00
Mimika	5,65	8,48	11,26
Boven Digoel	1,78	5,88	1,19
Mappi	1,44	4,06	9,69
Asmat	0,31	1,48	0,00
Yahukimo	0,88	0,91	0,00
Peg. Bintang	0,70	2,17	0,00
Tolikara	0,24	0,00	0,00
Sarmi	2,79	2,63	4,38
Keerom	1,14	11,13	6,41
Waropen	2,67	2,98	0,00
Supiori	5,85	11,14	3,96
Mamb. Raya	3,02	1,79	0,00
Nduga	0,66	0,00	-
Lanny Jaya	0,85	0,00	0,00
Mamb. Tengah	0,39	0,00	0,00
Yalimo	0,79	1,32	0,00
Puncak	1,26	0,00	0,00
Dogiyai	0,00	5,16	0,00
Intan Jaya	0,00	2,38	0,00
Deiyai	0,21	2,09	0,00
Kota Jayapura	3,98	12,27	8,50

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018

Kabupaten/kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	9,5%	79,3%	11,2%
Jayawijaya	0,0%	92,1%	7,9%
Kab, Jayapura	8,6%	75,5%	15,9%
Nabire	18,9%	61,1%	20,0%
Kep, Yapen	9,5%	60,9%	29,6%
Biak Numfor	4,4%	67,9%	27,7%
Paniai	34,3%	24,3%	41,4%
Puncak Jaya	65,8%	34,2%	0,0%
Mimika	14,8%	64,2%	21,0%
Boven Digoel	23,4%	73,0%	3,6%
Mappi	32,6%	36,2%	31,2%
Asmat	52,7%	47,3%	0,0%
Yahukimo	83,9%	16,1%	0,0%
Peg, Bintang	61,3%	38,7%	0,0%
Tolikara	100,0%	0,0%	0,0%
Sarmi	36,6%	37,9%	25,5%
Keerom	9,0%	82,1%	9,0%
Waropen	35,4%	64,6%	0,0%
Supiori	29,3%	64,6%	6,1%
Mamb, Raya	76,8%	23,2%	0,0%
Nduga	100,0%	0,0%	0,0%
Lanny Jaya	100,0%	0,0%	0,0%
Mamb. Tengah	100,0%	0,0%	0,0%
Yalimo	70,3%	29,7%	0,0%
Puncak	100,0%	0,0%	0,0%
Dogiyai	0,0%	100,0%	0,0%
Intan Jaya	0,0%	100,0%	0,0%
Deiyai	27,6%	72,4%	0,0%
Kota Jayapura	4,3%	70,6%	25,2%

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018

Kabupaten/kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	54,2%	36,1%	9,8%
Jayawijaya	70,5%	27,0%	2,5%
Kab, Jayapura	29,8%	58,7%	11,5%
Nabire	31,2%	57,7%	11,1%
Kep, Yapen	54,6%	34,8%	10,6%
Biak Numfor	46,5%	45,4%	8,1%
Paniai	70,0%	26,8%	3,3%
Puncak Jaya	70,4%	25,5%	4,0%
Mimika	37,1%	48,5%	14,4%
Boven Digoel	61,1%	32,7%	6,2%
Mappi	80,2%	17,3%	2,5%
Asmat	87,9%	11,2%	,9%
Yahukimo	81,7%	17,4%	,9%
Peg, Bintang	78,2%	15,5%	6,3%
Tolikara	74,6%	23,3%	2,1%
Sarmi	40,5%	42,9%	16,6%
Keerom	60,4%	35,1%	4,6%
Waropen	47,3%	44,1%	8,6%
Supiori	53,8%	45,1%	1,0%
Mamb, Raya	66,3%	32,8%	0,9%
Nduga	84,6%	15,4%	0,0%
Lanny Jaya	65,4%	30,8%	3,9%
Mamb, Tengah	74,7%	24,2%	1,1%
Yalimo	68,6%	27,4%	4,0%
Puncak	80,7%	14,6%	4,7%
Dogiyai	85,1%	14,9%	0,0%
Intan Jaya	81,0%	17,7%	1,3%
Deiyai	82,3%	17,1%	0,5%
Kota Jayapura	13,4%	46,4%	40,2%
PROV, PAPUA	67,2%	27,6%	5,2%

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	14.981	35.088	50.069
Jayawijaya	6.618	9.472	16.090
Kab, Jayapura	11.157	17.116	28.273
Nabire	8.695	21.228	29.923
Kep, Yapen	7.104	17.350	24.454
Biak Numfor	13.179	27.772	40.951
Paniai	4.129	8.031	12.160
Puncak Jaya	3.278	2.196	5.474
Mimika	11.542	37.068	48.610
Boven Digoel	2.569	6.062	8.631
Mappi	3.296	10.447	13.743
Asmat	4.057	5.953	10.010
Yahukimo	6.280	13.152	19.432
Peg, Bintang	2.628	3.610	6.238
Tolikara	2.600	1.952	4.552
Sarmi	2.409	5.560	7.969
Keerom	3.127	7.600	10.727
Waropen	2.387	6.390	8.777
Supiori	1.713	3.846	5.559
Mamb, Raya	948	3.521	4.469
Nduga	3.184	1.846	5.030
Lanny Jaya	4.434	4.582	9.016
Mamb, Tengah	868	626	1.494
Yalimo	3.625	2.368	5.993
Puncak	2.463	1.837	4.300
Dogiyai	3.740	4.972	8.712
Intan Jaya	2.920	6.231	9.151
Deiyai	2.124	2.915	5.039
Kota Jayapura	32.211	47.842	80.053
PROV. PAPUA	168.266	316.633	484.899

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 18. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2018

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	17,47	44,52	30,42
Jayawijaya	8,25	12,95	10,50
Kab, Jayapura	22,26	39,88	30,39
Nabire	14,85	42,64	27,62
Kep, Yapen	20,44	52,53	36,08
Biak Numfor	24,25	54,68	38,95
Paniai	7,07	14,91	10,83
Puncak Jaya	6,03	5,29	5,71
Mimika	12,72	56,62	31,12
Boven Digoel	9,90	30,82	18,92
Mappi	10,52	34,57	22,33
Asmat	13,19	21,59	17,16
Yahukimo	9,36	20,82	14,92
Peg, Bintang	10,20	15,57	12,74
Tolikara	5,13	4,51	4,84
Sarmi	15,22	44,91	28,25
Keerom	13,79	42,67	26,49
Waropen	20,92	63,93	41,00
Supiori	23,83	62,85	41,78
Mamb, Raya	12,28	50,86	30,52
Nduga	9,25	6,58	8,05
Lanny Jaya	7,22	7,80	7,51
Mamb, Tengah	5,00	3,89	4,46
Yalimo	15,54	12,47	14,17
Puncak	6,05	5,03	5,57
Dogiyai	11,76	15,91	13,82
Intan Jaya	16,91	35,61	26,32
Deiyai	9,23	11,79	10,55
Kota Jayapura	26,05	46,57	35,36
PROV. PAPUA	13,61	29,20	20,89

Ket: - : Not Available) Data tidak tersedia.

Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2018

Kabupaten/kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	42,3%	44,0%	13,6%
Jayawijaya	65,8%	27,7%	6,5%
Kab, Jayapura	21,2%	64,1%	14,7%
Nabire	27,6%	55,6%	16,8%
Kep, Yapen	31,6%	50,4%	17,9%
Biak Numfor	29,7%	55,4%	14,9%
Paniai	63,0%	31,2%	5,8%
Puncak Jaya	70,0%	25,3%	4,7%
Mimika	21,7%	62,8%	15,5%
Boven Digoel	46,0%	43,4%	10,7%
Mappi	65,0%	25,7%	9,3%
Asmat	83,3%	15,7%	1,0%
Yahukimo	82,5%	15,3%	2,1%
Peg, Bintang	77,5%	15,6%	6,9%
Tolikara	69,5%	27,1%	3,4%
Sarmi	39,4%	43,2%	17,5%
Keerom	47,3%	44,3%	8,4%
Waropen	33,2%	54,1%	12,6%
Supiori	40,6%	47,0%	12,4%
Mamb, Raya	65,7%	33,4%	,9%
Nduga	89,5%	10,5%	0,0%
Lanny Jaya	80,8%	17,3%	1,9%
Mamb, Tengah	79,7%	19,6%	,8%
Yalimo	74,8%	19,0%	6,2%
Puncak	71,3%	21,0%	7,8%
Dogiyai	73,8%	24,5%	1,7%
Intan Jaya	76,6%	21,3%	2,1%
Deiyai	77,1%	20,3%	2,6%
Kota Jayapura	10,9%	58,8%	30,2%
PROV. PAPUA	55,7%	34,8%	9,5%

Ket: - : Not Available) Data tidak tersedia.

Lampiran 20. Tabulasi Silang Batas Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

STATUS PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN UTAMA									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
Berusaha sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://papua.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA

Jl. Dr Sam Ratulangi Dok II Jayapura - Papua 99112

Telepon: 0967-534519, 533028 (Hunting) Fax. 536490

Email: bps9400@bps.go.id Homepage: <http://papua.bps.go.id>